

**KAJIAN PENINGKATAN PENGELOLAAN SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh :

**RANO WIRAJAYA RAHARJA
133410065**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN PENINGKATAN PENGELOLAAN SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Disusun Oleh :

RANO WIRAJAYA RAHARJA
133410065

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ir. H. FIRDAUS, MP


PUJI ASTUTI, ST., MT

Disahkan Oleh :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI


Ir. H. ABDUL KUDUS ZAINI, MT


PUJI ASTUTI, ST., MT

**KAJIAN PENINGKATAN PENGELOLAAN SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

RANO WIRAJAYA RAHARJA

133410065

ABSTRAK

Perkembangan wilayah secara umum di dukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 37.030.725 peringkat ke 8 dari 12 Kabupaten Kota Provinsi Riau. Sub sektor perkebunan kelapa sawit 7,3% dari luas kabupaten, akan tetapi tidak berperan maksimal dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Tujuan dari penelitian ini untuk memetakan persebaran sektor–sektor unggulan, mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan, menyusun strategi untuk meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan menggunakan analisis overlay dan deskriptif, serta menyusun strategi peningkatan sektor unggulan dengan analisis LFA.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis overlay terpetakan sektor unggulan dengan luas lahan sektor kehutanan 460.675 Ha, sektor pertanian 90.181 Ha, dan sektor perikanan 6.802 Ha. Pengelolaan sektor unggulan didukung oleh program-program dinas terkait namun program yang disusun tidak disertai program evaluasi. Sehingga perlu diadakan pengawasan pelaksanaan program-program pengelolaan sektor unggulan, untuk mengoptimalisasikan program pengelolaan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci : PDRB, Pengelolaan, Sektor Unggulan

**STUDY ON IMPROVED MANAGEMENT OF PRIMARY SECTORS
IN INDRAGIRI HULU REGENCY**

RANO WIRAJAYA RAHARJA

133410065

ABSTRACT

Regional development in general is supported by Gross Regional Domestic Product. Gross Regional Domestic Product of Indragiri Hulu regency Rp. 37.030.725 ranked 8th out of 12 Regency in Riau Province. Palm oil plantation sub sector 7.3% from the regency area but, it does not have the maximum role in increasing the . Gross Regional Domestic Product of Indragiri Hulu Regency.

The purpose of this study is to map the distribution of primary sectors, identify factors that influence management of primary sectors, formulate strategies to improve the management of primary sectors in the Regency of Indragiri Hulu. By using overlay and descriptive analysis, then formulate a primary sector improvement strategy with LFA analysis.

The results of the study using the overlay mapping of primary sectors with a forest area of 460,675 Ha, agriculture sector 90,181 Ha, and the fisheries sector 6,802 Ha. Primary sector management is supported by related service programs but the programs prepared are not accompanied by evaluation programs. Then it is necessary to supervise the implementation of primary sector management programs. To optimize the primary sector management program in order to improve the Gross Regional Domestic Product of Indragiri Hulu Regency.

Keywords: Gross Regional Domestic Product , Management, Primary Sector

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadirat ALLAH Subhanahuwata'alla, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "*Kajian Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu*" sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata I pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Ayahanda Kamidi Raharja, Ibunda Yayuk Erni, S.Pd. dan keluarga besar yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi, materi dan pengorbanan yang tidak terhingga.
2. Bapak Ir. H. Abdul Kudus, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Pui Astuti, ST.,MT. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Muhammad Sofwan, ST.,MT. selaku Sekertaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Ir. H. Fidaus Agus, MP selaku Dosen pembimbing satu yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan pengarahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Ibu Puji Astuti, ST.,MT. selaku Dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan pengarahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau khususnya Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Planologi angkatan 2013 yang senantiasa rela membagi ilmu, motivasi, persaudaraan, waktu, solidaritas.
9. Kepada seluruh Keluarga Besar KPK, Balak Onam, Aurora Garden yang senantiasa mendukung serta selalu berbagi ilmu kepada penulis.
10. Serta seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 2019

Rano Wirajaya Raharja

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Sasaran Penelitian	7
1.3.3. Manfaat Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah	8
1.4.2. Ruang Lingkup Subtansi	10
1.5 Kerangka Berfikir.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Basis Ekonomi (<i>Economi Base Theory</i>)	15
2.2 Pengertian Sektor Unggulan.....	16
2.3 Keiteria Sektor Unggulan.....	18

2.4	Teori dan Konsep Keunggulan Komperatif	19
2.5	Pengelolaan Sektor Unggulan	20
2.5.1	Pengertian Pengelolaan.....	20
2.5.2	Tujuan Pengelolaan.....	21
2.5.3	Fungsi Pengelolaan.....	22
2.5.4	Pengelolaan yang Baik.....	24
2.6	Pembangunan Sektor Unggulan.....	25
2.7	Strategi Pembangunan Daerah	27
2.8	Ringkasan Teori	30
2.9	Penelitian Terdahulu	38
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Pendekatan Penelitian	50
3.2	Jenis dan Sumber Data	51
3.2.1	Data Primer	51
3.2.2	Data Sekunder.....	51
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.4	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5.1	Survei Primer	54
3.5.2	Survei Sekunder.....	54
3.6	Teknik Sampling	54

3.7	Pemetaan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu.....	55
3.8	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sektor Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu.....	56
3.9	Strategi Meningkatkan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	57

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1	Kondisi Geografis dan Administratif.....	60
4.1.1	Kondisi Penggunaan Lahan.....	61
4.2	Kependudukan.....	65
4.3	Ekonomi.....	69
4.3.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	70
4.3.2	Tenaga Kerja.....	71
4.3.3	Produk Domestik Regional Bruto.....	72

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.	Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	80
5.2.	Memetakan Persebaran dari Sektor – Sektor Unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.....	81
5.2.1	Sektor – sektor Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu.....	83
5.2.1.1	Sektor Pertanian.....	86
5.2.1.2	Sektor Perikanan.....	87

5.2.1.3 Sektor Kehutanan.....	88
5.3. Mengidentifikasi Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.....	89
5.3.1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	90
5.3.1.1 Program Sektor Pertanian	91
5.3.1.2 Program Sektor Perikanan	92
5.3.1.3 Program Sektor Kehutanan.....	93
5.3.2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	95
5.2.2.1 Sektor Pertanian	95
5.2.2.2 Sektor Perikanan	100
5.2.2.3 Sektor Kehutanan.....	101
5.3.3. Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	102
5.2.3.1 Sektor Pertanian	102
5.2.3.2 Sektor Perikanan	104
5.2.3.3 Sektor Kehutanan.....	106
5.3.4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	106
5.2.5. Deskriptif	107
5.4 Strategi Meningkatkan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	108
5.4.1. Analisis Permasalahan	108
5.4.2. Analisis Program.....	110
5.4.3. Analisis <i>Stake Holder</i>	116
5.4.4. Analisis (<i>Logical Framework Analisis</i>).....	117

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan..... 120

6.2 Saran dan Rekomendasi 121

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Teori.....	32
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1	Responden Penelitian.....	61
Tabel 4.2	Desain Penelitian.....	63
Tabel 4.3	Penggunaan Lahan Sektor Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan 2017 (Ha).....	64
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2012-2017.....	65
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	67
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.....	68
Tabel 4.7	Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012-2017 ...	69
Tabel 4.8	Retribusi Sektor Unggulan Pada PAD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012-2017 (juta rupiah).....	70
Tabel 4.9	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012-2017.....	71
Tabel 4.10	PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2017 (Dalam Juta Rupiah).....	73
Tabel 4.11	PDRB Provinsi Riau Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2017 (Dalam Juta Rupiah).....	75

Tabel 4.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2017.....	77
Tabel 5.1	PDRB dan Persentase Kabupaten Indragiri Hulu	80
Tabel 5.2	Luas Lahan yang Tidak Produktif Berdasarkan HASil Wawancara di Kabupaten Indragiri Hulu	83
Tabel 5.3	Persebaran Luas Lahan Sektor-sektor Unggulan Indragiri Hulu Berdasarkan Kecamatan	84
Tabel 5.4	Jenis-jenis pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu	86
Tabel 5.5	Analisi Program.....	111
Tabel 5.6	Strategi Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu	9
Gambar 1.2	Kerangka Berfikir.....	12
Gambar 3.1	Tahapan Penelitian.....	52
Gambar 5.1	Peta Persebaran Sektor Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Galtung dalam Trijono, 2007).

Untuk menunjang pembangunan di setiap daerah – daerah maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi

masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang-undang nomor 23 tahun 2014). Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Dengan di laksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak yang lebih luas untuk menentukan kebijakan serta program pembangunan terbaik bagi daerahnya masing – masing sesuai dengan kultur yang ada di daerah tersebut. Baik secara demografi, geografis, infrastruktr, sumber daya, serta budaya yang berbeda – beda hal ini menimbulkan adanya perbedaan proses pembangunan serta kemajuan masing – masing daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatnya tuntutan daerah, dan kemungkinan disintegrasi bangsa (Novrilasari dalam Mailendra 2016).

Dengan kondisi kultur yang berbeda di setiap daerah yang ada di Indonesia tentunya sumberdaya yang terdapat di masing – masing daerah juga sangat berbeda dan terbatas. Untuk memaksimalkan pembangunan daerah/wilayah tentunya harus mengoptimalkan pengolahan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pengoptimalan pengolahan sumberdaya yang ada di setiap daerah tentunya tidak terlepas dari apa yang ada di daerah tersebut. Pembangunan wilayah melibatkan pihak – pihak seperti pihak pemerintah sebagai fasilitator, pihak swasta sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai aktor yang menjalankan pertumbuhan daerah tersebut.

Perkembangan wilayah secara umum di dukung oleh beberapa sektor yang tertuang di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di dalam PDRB tersebut dapat di lihat sektor yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap daerah/wilayah sehingga dapat di tentuka sektor mana yang menjadi sektor unggulan di daerah tersebut.

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki kriteria sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya (Rachbini, 2001).

Sektor – sektor yang ada di dalam PDRB terbagi menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor sekunder di antaranya yaitu bangunan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih. Sektor primer terdiri atas sektor pertanian, kehutanan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian. Sektor tersier adalah sektor yang tidak memproduksi barang akan tetapi sektor tersier lebih mengarah ke jasa – jasa, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan persewaan, serta jasa perusahaan.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang ber ibu kota kan Rengat. Indragiri Hulu memiliki wilayah berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa – rawa dengan ketinggian 5 – 100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah 8.198,26 km² (819.826,0 Ha).

Berdasarkan data Indragiri Hulu dalam angka 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 417.733 jiwa pada tahun 2016. Angka ini mengalami penurunan sebesar 9,6% dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 50,95 jiwa/km². Sektor penyumbang PDRB Kabupaten Indragiri Hulu di antaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat masing menyumbang sebesar 28,88% dan di susul oleh sektor industri pengolahan sebesar 28,54% menyumbang untuk PDRB kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan jumlah PDRB yang di sumbangkan oleh Provinsi Riau ke PDB nasional tidak lepas dari sumbangan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu ke Provinsi Riau adalah senilai Rp. 37.030.725,87 (Indragiri Hulu dalam angka 2017).

PDRB Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai Rp. 37.030.725 masih termasuk rendah di Provinsi Riau di antara 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu berada di peringkat ke 8 (delapan), di bawah Kabupaten Pelalawan yang berada di peringkat ke 7 (tujuh) di Provinsi Riau, jika di lihat luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu cukup luas yang miliki luas 7,3% dari total keseluruhan luas kabupaten, akan tetapi tidak berperan maksimal dalam meningkatkan PDRB Kabupaen Indragiri Hulu. Dengan luas perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten tersebut masih belum dapat meningkat kan PDRB

kabupaten yang tergolong kedalam kabupaten yang memiliki PDRB cukup rendah yang ada di Provinsi Riau.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2016, PDRB Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki PDRB peringkat 8 di Provinsi Riau hal ini masih belum sebanding dengan luas perkebunan yang ada di kabupaten tersebut. Mengingat kelapa sawit adalah salah satu sektor sub unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan jika dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hulu memiliki persentase lahan perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar 7,3% di mana perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sub sektor unggulan dalam penyumbang PDRB Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dari itu hal ini mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Kajian Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu”** untuk dapat mengkaji pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya harus diketahui terlebih dahulu faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu barulah penulis dapat memformulasikan strategi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok di daerah studi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tiga sektor Unggulan yaitu sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor perikanan. Dari ketiga sektor Unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini sama sekali belum terpetakan persebaran dari ketiga sektor tersebut.
2. Menurut data dari BPS Provinsi Riau tahun 2016, PDRB Kabupaten Indragiri Hulu termasuk kedalam kabupaten yang memiliki PDRB yang cukup rendah dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan jika di lihat dari kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hulu memiliki persentase lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten ini yang cukup besar yaitu seluas 7,3% dari luas keseluruhan Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas kabupaten ini masih tergolong kabupaten yang memiliki PDRB yang cukup rendah di Provinsi Riau.
3. Untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu di perlukan strategi – strategi yang tepat untuk mengelola sektor – sektor unggulan yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat di simpulkan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana sebaran dari sektor – sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana strategi meningkatkan pengelolaan sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan, sasaran, dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan maka tujuan penelitian adalah :

1. Memetakan persebaran sektor – sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bagaimana strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Menurut Sasaran penelian adalah sebagai berikut:

1. Terpetakannya persebaran dari sektor – sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
Teridentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Tersusunya strategi baru untuk meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3.3. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah.

Menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Akademik.

Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tentang peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup kawasan studi penelitian adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang memiliki persentase luas wilayah sebesar 9,42% dari total luas Provinsi Riau dengan total luas 87.024 km², dengan wilayah administrasi sebanyak 14 kecamatan. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki jumlah penduduk tercatat 417.733 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 29.730 jiwa atau persentase 7,11% penduduk Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pengeluaran di bawah standar kemiskinan yang pada tahun 2017 sebesar Rp 419.737 Artinya penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 419.737 dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi

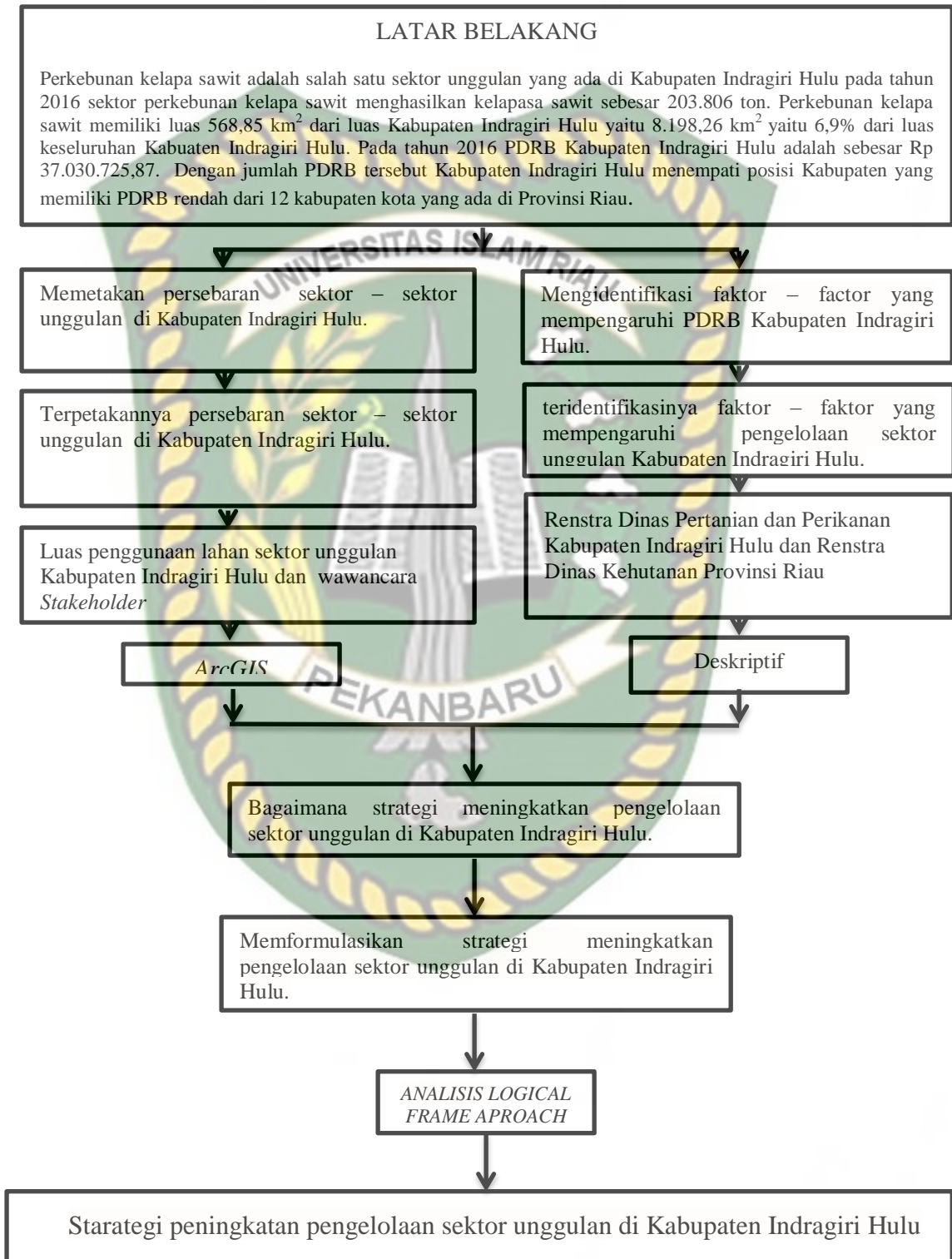
Adapun Ruang Lingkup Materi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran sektor unggulan dengan memetakan letak persebaran sektor unggulan tersebut. Selanjutnya tujuan ini bertujuan untuk mengetahui faktor kurangnya kontribusi sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu yang masih rendah. Sehingga dapat memformulasikan strategi untuk meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tiga sektor unggulan yaitu sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor perikanan. Dari ketiga sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini sama sekali belum terpetakan persebaran dari ketiga sektor tersebut. Sehingga perlu di identifikasinya persebaran dari sektor – sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan data – data yang di perlukan yaitu salah satunya data luas lahan sektor unggulan yang di *overlay* sehingga terpetakannya persebaran dari sektor – sektor unggulan yang ada.
2. Menurut data dari BPS Provinsi Riau tahun 2016, PDRB Kabupaten Indragiri Hulu termasuk kedalam kabupaten yang memiliki PDRB yang cukup rendah dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan jika di lihat dari kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hulu memiliki persentase lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten ini yang cukup besar yaitu seluas 7,3% dari luas keseluruhan Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi dengan lahan

perkebunan kelapa sawit yang cukup luas kabupaten ini masih tergolong kabupaten yang memiliki PDRB yang cukup rendah di Provinsi Riau. Dengan luas lahan pertanian yang cukup luas di anggap tidak sebanding dengan PDRB yang di hasilkan maka harus di identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.. Untuk mengidentifikasi faktor – fartor yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu. peneliti menggunakan metode analisi deskriptif.

3. Untuk mengetahui strategi meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu digunakan analisis LFA dengan cara wawancara kepada pemerintah daerah sehingga dapat teridentifikasinya strategi peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5 Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisisan, dimana sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai literatur yang di gunakan sebagai acuan dan arahan dalam melakukan penelitian dan mengerjakan Tugas Akhir yang menjelaskan mengenai teori basis ekonomi, pengertian sektor unggulan, kriteria penentuan sektor unggulan, tori dan konsep keunggulan kompratif, pengelolaan sektor unggulan, pembangunan sektor unggulan, strategi pembangunan daerah, ringkasan teori, dan penelitian terdahulu

BAB III MEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, alat penelitian, tahapan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, variabel dan desain penelitian, teknik analisis, dan teknik sampling.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini berisikan deskripsi wilayah penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Indragiri Hulu secara umum, kependudukan, keadaan kinerja ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisa dan hasil dari penelitian yakni analisis deskriptif dan aplikasi arcgis untuk memetakan persebaran sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan data luas lahan sektor unggulan perkecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, mengidentifikasi faktor – faktor pengelolaan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu dengan analisis deskriptif dari rencana strategis terhadap pengolahan sektor unggulan yang ada di kabupaten tersebut, serta analisis logical frame analisis untuk merumuskan strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VI KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil kajian peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu dan berisikan rekomendasi penulisan terhadap pemerintah Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad dalam Damara, 2016).

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang atau jasa-jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal (Glasson dalam Fadillah 2016).

2.2 Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di banding kan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor

yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000).

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar. Jadi sektor unggulan merupakan sektor kegiatan usaha yang dapat diunggulkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan perekonomian sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Setiap wilayah memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda, tergantung pada potensi (kekuatan atau kelebihan) yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah bersangkutan. Sektor ekonomi unggulan sebagai sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa yang akan datang dengan kriteria yang sama. Dalam hal ini, sektor ekonomi yang dianggap unggul tersebut baik terhadap persoalan sosial maupun lingkungan.

Faktor keterbatasan dana dan sumber daya menjadikan Pemerintah Daerah tidak memungkinkan untuk bisa mengembangkan seluruh sektor yang dimiliki secara bersamaan. Langkah yang bisa dijadikan pilihan adalah dengan melakukan

investasi pada satu atau beberapa sektor usaha saja. Sektor yang dipilih merupakan sektor ekonomi unggulan (Widodo, 2006).

2.3 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakanyang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

2.4 Teori dan Konsep Keunggulan Komparatif

Menurut Porter (dalam Nasri, 2019) yang dimaksud dengan keunggulan adalah kelebihan yang melekat pada suatu komoditi yang dihasilkan suatu negara dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi di negara lain. Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan suatu komoditi mempunyai keunggulan tertentu yaitu :

1. Faktor Alam

Letak geografis suatu negara, kandungan alam, dan keindahan alam dapat menjadi sebab terciptanya keunggulan tertentu bagi suatu komoditi. Semua jenis keunggulan yang berkaitan dengan faktor alam ini disebut keunggulan mutlak atau absolute advantage.

2. Faktor Biaya Produksi

Manajemen produksi yang baik dapat menekan biaya produksi suatu komoditi. Manajemen produksi nasional yang baik akan melahirkan apa yang lazim disebut sebagai keunggulan komparatif atau comparative advantage. Manajemen produksi suatu perusahaan yang baik akan melahirkan peningkatan daya saing komoditi di pasar internasional.

3. Faktor Teknologi

Teknologi yang dipakai dalam produksi menentukan antara lain tingkat kapasitas produksi suatu komoditi. Yang dimaksud dengan tingkat kapasitas produksi adalah perbandingan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh dua jenis alat produksi yang dipakai dalam memproduksi suatu komoditi yang serupa. diukur

dalam jangka waktu tertentu. Keunggulan yang bersumber dari perbedaan teknologi ini disebut keunggulan teknologi.

2.5 Pengelolaan Sektor Unggulan

2.5.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2002).

Menurut Soewarno Handyaningrat dalam Sanjaya (2014) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang

terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.

2.5.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada dalam suatu daerah dapat dikelola sedemikian rupa, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua daerah, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan daerah berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi daerah dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, (Afifiddin 2010) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan Tahap berikutnya, berlangsung secara berulang – ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.5.3 Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut John D. Millet dalam Fadillah (2016) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning*

(Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

R. Terry George (2006) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling* Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal

maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

2.5.4 Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut R. Terry George (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang

akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.6 Pembangunan Sektor Unggulan

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi Arsyad dalam Khotijah (2017)

Menurut Safi'i (2007) paradigma baru strategi pembangunan ekonomi daerah mencakup beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
2. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya.
3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

Sektor ekonomi potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain, dengan demikian produk dan jasa dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi kebutuhan sendiri, selebihnya dapat dijual ke luar daerah sehingga daerah memperoleh pendapatan masuk. Pendapatan masuk tersebut akan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan menggerakkan sektor ekonomi potensial yang sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang tidak potensial, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan berkembang yang pada akhirnya masing-masing sektor ekonomi merupakan pasar bagi sektor lain. Kondisi

tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah ini harus dibuat berdasarkan peluang serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang ramah terhadap dunia usaha.

2.7 Strategi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut: .

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Pada ayat yang ke 10, ditegaskan apabila ibadah shalat telah dilaksanakan, maka kita di peruntukkan untuk melanjutkan aktivitas untuk mencari karunia Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa kita tidak boleh malas karena rezki Allah tidak datang dengan sendirinya. Potensi akal yang dimiliki manusia hendaknya menjadi modal utama untuk meningkatkan modal utama untuk meningkatkan produktivitas kerja secara inovatif, agar hidupnya lebih berkualitas. Umat islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain.

Dimanapun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada QS al-Jumuah ayat 10 umat islam di perintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti bekerja keras dan belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya, selain selalu berisikan perintah melaksanakan shalat jumat juga memerintahkan setiap umat islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezki sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi.

Menurut Arsyad dalam Khotijah (2017) pembangunan ekonomi daerah didefinisikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan, dan perkembangan perusahaan-perusahaan baru.

Tujuan utama adanya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Untuk itu,

pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merangsang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) di daerah itu sendiri dimana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah sendiri mengalami banyak perbedaan sehingga implikasi terhadap penurunan dan naiknya pertumbuhan ekonomi setiap daerah juga berbeda, hal ini didasarkan dari kondisi wilayah tersebut, peniruan pola secara mentah-mentah pada pembangunan suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainya. Potensi setiap daerah sebagai penopang utama dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengalami kenaikan, melihat potensi ekonomi dan kondisi wilayah maka dapat mejadikan rumusan menentukan pola, kebijakan, dan strategi.

2.8 Ringkasan Teori

Ringkasan teori adalah rangkuman dari teori – teori yang di gunakan dalam penelitian, dalam hal ini ringkasan teori yang di sajikan yaitu teori – teori tentang peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Adapun teori – teori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Riangkasan Teori

No	Teori	Sumber	Keterangan
Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)			
1	Definisi Teori Basis (economic Base Theory)	Arsyad, (1999) dalam Damara (2016) Glasson, (1977) dalam Fadillah (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. - Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang atau jasa-jasa ke tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang atau jasa-jasa mereka kepada orang-orang di luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal.
Pengertian Sektor Unggulan			
2	Definisi Sektor Unggulan	Rachbini, (2001).	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di banding kan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal,

No	Teori	Sumber	Keterangan
		<p>Widodo (2006)</p> <p>Suyanto,(2000)</p>	<p>pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya. - Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.
Kriteria Penentuan Sektor Unggulan			
3	Kriteria Sektor Unggula	Rachbini (2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu : • Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek

No	Teori	Sumber	Keterangan
			<p>permintaan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. • Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. • Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.
Pembangunan Ekonomi Daerah			
4	Pembangunan Ekonomi Daerah	Arsyad (1999) dalam Khotijah (2017)	<p>- Pembangunan ekonomi daerah didefinisikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan, dan perkembangan perusahaan-perusahaan baru.</p>
Pembangunan Sektor Unggulan dan Strategi Pembangunan Daerah			
5	Pembangunan Sektor Unggulan dan Strategi Pembangunan Daerah	Arsyad (1999) dalam Fadilah (2016)	<p>- Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (<i>endogenous development</i>) dengan</p>

No	Teori	Sumber	Keterangan
		Safi'i (2007)	<p>menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pradigma baru strategi pembangunan ekonomi daerah mencakup beberapa hal berikut, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan. • Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya. • Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.
Pengertian Pengelolaan			
6	Definisi Pengelolaan	<p>Peter Salim dan Yenny Salim (2002)</p> <p>Soewarno Handyaningrat (1997) dalam Sanjaya (2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. - Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang

No	Teori	Sumber	Keterangan
		Depdikbud, 1995/1996 : 1-2	<p>di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.
Tujuan Pengelolaan			
7	Tujuan Pengelolaan	Afifiddin (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: • Menentukan strategi • Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab • Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu. • Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. • Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi • Menentukan ukuran untuk menilai • Mengadakan pertemuan • Pelaksanaan.

No	Teori	Sumber	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengadaan penilaian • Mengadakan review secara berkala. • k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang
Fungsi Pengelolaan			
8	Fungsi Pengelolaan	Sobri, dkk (2009) menurut John D. Millet(1994) dalam Fadillah (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. • Fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
Pengelolaan yang baik			
9	Pengelolaan yang baik	Geroge R. Terry (2006)	<p>- Pengelolaan yang baik meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan (<i>Planning</i>) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. • Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. • Penggerakan (<i>Actuating</i>) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang

No	Teori	Sumber	Keterangan
			<p>telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan (<i>Controlling</i>) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.



2.9 Penelitian Terdahulu

Ilmu tentang pengrlolaan sektor potensial adalah ilmu yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan ekonomi suatu daerah. Penelitian tentang hal tersebut sudah banyak di lakukan terulang di bidang akademis. Berikut di uraikan beberapa penelitian terkait dengan sektor potensial.



Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Mailendra (2016)	Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	LQ, Analisi Gabungan LQ dan DLQ, Analisis Shift Share, Analisis Swot	Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, maka di dapat beberapa kesimpulan: <ul style="list-style-type: none"> • Dari 17 lapangan usaha/sector yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat menjadi 9 sektor yng menjadi unggulan. • Selanjutnya di lihat dari tipe loginya sektor – sektor unggulan tersebut satu di antaranya adalah sektor unggulan yang bertipe tidak prospektif. • Sementara itu jika dilihat dari daya saingnya terdapat 2 sektor unggulan yang tergolong memiliki kemampuan daya saing yang baik. • Hasil dari rumusa strategi berdasarkan komponen wilayah strategi yang di hasilkan adalah mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
2	Damara (2016)	Analisis Sektor unggulan dan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah	Analisis LQ	Sektor ekonomi yang unggul di Provinsi Sulawesi Tenggara dari aspek output yaitu sektor Pertanian, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Sementara dari aspek tenaga kerja maka sektor

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di Provinsi Sulawesi Tenggara dibanding penyerapan tenaga kerja secara nasional yaitu sektor pertanian. Dengan demikian pemerintah perlu mempertahankan ssektor pertanian dalam jangka panjang. Pada sisi lain, perlu menciptakan lapangan kerja khususnya bagi sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja pada sektor tertentu guna menghindari masuknya tenaga kerja terlatih pada sektor-sektor strategis di Sulawesi tenggara.</p>
3	Bayu Wijaya dan Hastarini Dwi Atmanti (2006)	Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Salatiga	LQ, Shift Share, Analisis Gravitasi dan Analisis SWOT	<p>Sektor-sektor yang termasuk Tipologi I adalah sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa, dimana sektor-sektor tersebut merupakan basis sekaligus pertumbuhannya cepat sehingga dapat menjadi sektor yang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan sektor ekonomi yang termasuk Tipologi II adalah listrik, gas dan air bersih. Sektor ini mempunyai nilai $LQ > 1$ yang berarti merupakan basis namun karena pertumbuhannya lambat maka</p>

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>perlu perhatian karena cukup berpotensi untuk dikembangkan. Untuk Tipologi III yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Sektor ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan yang termasuk Tipologi IV adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini dianggap tidak berpotensi karena bukan sektor basis dan pertumbuhannya lambat. Jadi ada 4 sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, dan ada 1 sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, serta ada 2 sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor pertanian dan sektor-sektor industri pengolahan.</p>
4	Uray Muhammad Taufan Fadillah (2016)	Analisis Sektor Unggulan di Kota Tangerang Selatan	Analisis LQ, <i>Shift Share</i>	Dari 17 sektor yang diteliti hanya terdapat tiga sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi di Kota Tangerang Selatan, yaitu: 1) Sektor pertanian, kehutanan, dan

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>perikanan, 2) Jasa keuangan dan asuransi, 3) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sedangkan sektor yang merupakan unggulan karena sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi di Kota Tangerang Selatan adalah 1) Sektor konstruksi, 2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum, 4) Informasi dan komunikasi, 5) Real estat, 6) Jasa perusahaan.</p>
5	Mohammad Krisna Sanjaya (2014)	Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Madiun Tahun 2007-2011	Analisis <i>shift share</i>	<p>Hasil analisis shift share Esteban Marquillas terlihat bahwa pengaruh pertumbuhan nasional (Nij) propinsi Jawa Timur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Madiun. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi positif tertinggi terhadap produk domestik regional bruto kota Madiun adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran disusul sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih,</p>

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>dan sektor pertambangan dan penggalian. Komponen bauran industri (Mij) menyatakan pengaruh pertumbuhan sektor akibat adanya bauran industri. Sektor-sektor yang mendapat pengaruh bauran industri tertinggi dan mempunyai nilai positif adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran disusul sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang memberikan pengaruh bauran industri yang bernilai negatif adalah sektor industri pengelolaan, sektor jasa-jasa, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pertanian. Sektor perekonomian dengan keunggulan kompetitif (C'ij) yang mempunyai kemampuan berdaya saing tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restorandisusul sektor konstruksi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor listrik, gas dan air bersih.Sedangkan sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor industri pengelolaan, sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor jasa-</p>



No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>jasa. Semua sektor memiliki kinerja (Dij) yang bernilai positif tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran disusul sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengelolaan, sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor pertambangan dan penggalian.</p>
6	Piko Permada (2014)	Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 1988-2012	Regresi Linear Berganda dengan metode OLS (ordinary least square).	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa dari uji spesifikasi model diketahui bahwa model linier, untuk uji normalitas distribusi U normal. Uji asumsi klasik diketahui bahwa pada uji multikolinieritas terdapat masalah multikol pada ekspor dan jumlah penduduk sedangkan pada uji heterokedastisitas dan autokorelasi tidak ditemukan masalah. Uji validitas pengaruh (uji t) untuk variabel ekspor dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perdagangan pada $\alpha = 1\%$, untuk jumlah perusahaan berpengaruh pada $\alpha = 5\%$, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 10\%$. Dari uji F menunjukkan bahwa variabel ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk</p>

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB sektor perdagangan atau model eksis. Nilai R ² sebesar 0,996616 artinya 99,6% variasi dari variabel PDRB sektor perdagangan dapat dijelaskan oleh variabel ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk, sedangkan sisanya 0,4% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar model yang diestimasi.
7	Afdal (2010)	Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Riil Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.	Regresi Linear Berganda dengan metode OLS (ordinary least square).	Hasil penelitian menunjukkan secara umum di kabupaten/kota di Sumatera Barat variabel Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Belanja Pembangunan, dan Tenaga Kerja yang bekerja mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB riil Perkapita. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk lebih mengelola sumber ekonomi local yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah yang ditandai dengan peningkatan PDRB riil Perkapita.
8	Rosnida Siregar (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Sektor Pertanian	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variabel luas lahan pertanian, pekerja sektor pertanian dan kebutuhan pupuk secara signifikan

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Sumatera Utara. Tesis.		berpengaruh inelastis terhadap PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara. Elastisitas yang paling besar mempengaruhi PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara adalah variabel kebutuhan pupuk dengan nilai elastisitas sebesar 0,59 dan diikuti berturut-turut yaitu variabel pekerja sektor pertanian dengan nilai elastisitas sebesar 0,39 dan variabel luas lahan pertanian dengan nilai elastisitas sebesar 0,26. Dengan demikian tampak bahwa kebutuhan pupuk berpengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara. Secara simultan luas lahan pertanian, pekerja sektor pertanian dan kebutuhan pupuk berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara dan hasil estimasi regresi berganda ($0,26 + 0,39 + 0,59 = 1,24$) adalah Increasing Return to Scale atau artinya jika kita bisa menambahi input (luas lahan, pekerja dan kebutuhan pupuk) maka pertumbuhan PDRB sektor pertanian bisa ditingkatkan.
9	Nasri (2019)	Kajian Peningkatan Pendapatan petani padi di Kecamatan Bunga Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Chi Square • LFA 	Hasil analisis karakteristik sosial ekonomi dan pendapatan petani di Kecamatan Bunga Raya terdapat hasil kusioner yakni tingkat pendidikan

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>petani padi di Kecamatan Bunga Raya sekolah SD sebanyak 67 orang petani dengan persentase 67%. Berdasarkan Umur petani yakni 51-60 sebanyak 54 orang dengan persentase 54. Berdasarkan waktu masa panen padi yaitu 5-6 bulan sebanyak 66 orang petani dengan persentase 66%. Berdasarkan status kepemilikan lahan pertanian lahan milik pribadi sebanyak 84 orang dengan persentase 84%. Berdasarkan pekerjaan sampingan yang tidak memiliki usaha sampingan sebanyak 52 orang petani dengan persentase 52%, Berdasarkan tanggungan keluarga yang memiliki anak 4 orang berjumlah 72 orang petani dengan persentase 72%. Berdasarkan tingkat pendapatan petani padi di Kecamatan Bunga Raya yang mempunyai lahan < 1 hektar sebanyak 65 orang petani.</p> <p>Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dan pendapatan dari hasil analisis <i>chi Square</i> untuk tingkat pendidikan dan luas lahan mempunyai hubungan, Sedangkan untuk umur petani, lamanya bertani padi, usaha sampingan, tanggungan keluarga tidak ada hubungan.</p> <p>Strategi peningkatan pendapatan petani padi</p>

No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>di Kecamatan Bunga Raya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemberian pelatihan untuk menambah pendidikan tentang pemilihan bibit unggul tanaman padi, memberikan pelatihan dalam menggunakan alat dan bantuan tanaman pangan pertanian, memberikan pendidikan tentang pengendalian hama, Melakukan pelatihan tentang penggunaan alat pra panen dan pasca panen untuk meningkatkan hasil tanaman padi, memberikan pelatihan pengelolaan hasil produksi padi, memberikan pelatihan pendidikan tentang <i>standard operational procedure</i> Komoditas unggulan, di Kecamatan Bunga Raya dikarenakan tingkat pendidikan petani berhubungan dengan pendapatan petani padi. 2. Melakukan penambahan luas lahan untuk peningkatan pendapatan petani, melakukan pemanfaatan lahan yang sempit untuk hasil yang maksimal, memberikan lahan baru untuk menambah lahan pertanian padi,



No	Peneliti	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				Kecamatan Bunga Raya yang dikarenakan rendahnya pendapatan diakibatkan sempitnya lahan yang dimiliki petani.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam melakukan penelitian. Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terancam, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dilihat dari tujuan ini maka ada beberapa pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan menginterpretasikan objek apa adanya (Creswell, 2004 dalam Mailendra, 2006). Pendekatan deskriptif digunakan pada penyusunan hasil wawancara. Dimana hasil wawan cara digunakan untuk merumuskan strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan.

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Alfabeta, 2010). Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalamnya berisikan data – data numerik atau angka dengan menggunakan berbagai metode dan perhitungan rumus dalam menentukan hasilnya, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya PDRB sektor unggulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2006) dalam Mailendra (2016) data merupakan segala fakta dan angka yang dapat di jadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu kebutuhan. Berdasarkan jenisnya, dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data yang di butuhkan yaitu data primer dan data skunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Penelitian tentang kajian peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu ini memerlukan data Primer yang ini yang akan menggunakan salah satu metode analisa yang di gunakan yaitu LFA (*Analisis Logical Frame Aproach*) dan cara memperoleh data yang di gunakan dengan metode wawan cara/kuesioner.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Umumnya data sekunder berupa arsip,

catatan atau laporan yang di dapatkan dari instansi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan. Adapun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu data PDRB kabupaten dan PDRB Provinsi Riau.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabuapten Indragri Hulu, alasan mengapa mengambil lokasi studi sebagai obyek penelitian karena Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki PDRB peringkat 8 di Provinsi Riau hal ini masih belum sebanding dengan luas perkebunan yang ada di kabupaten tersebut. Penelitian ini di mulai pada tanggal 8 maret 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2019.

3.4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan panduan langkah pengerjaan penelitian tugas akhir ini secara sistematis, mulai dari awal sampai diperoleh hasil. Dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan di lalui yaitu di gambarkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Tahapan Penelitian

(Sumber : Hasil Analisis 2018)

Setelah ditentukannya lokasi penelitian, maka langkah awal setelahnya yaitu memilih masalah. Kemudian, perumusan tujuan dari penelitian, serta menentukan judul penelitian. Selanjutnya sebelum melakukan penelitian perlu dilakukannya

studi pendahuluan. menurut Buckley (2006) dalam Mailendra (2016) studi pendahuluan merupakan bentuk studi terhadap dokumen dan pustaka atas buku – buku pelajaran dan artikel – artikel lainnya. Studi pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang Kajian Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, pada tahapan ini data – data yang di butuhkan di kumpulkan berdasarkan keperluan penelitian, lalu selanjutnya tahap analisa data. Pada tahap analisa data, pada tahap analisa data, data – data yang telah di kumpulkan di analisa menggunakan teknik analisa sesuai dengan tujuan yang akan di lakukan peneliti. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, pada tahap ini adalah hasil analisa yang di deskripsikan, hal ini di lakukan untuk melihat hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan untuk mendapatkan data yang di buthkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan menggunakan teknik survei primer dan survei sekunder.

3.5.1 Survei Primer

Survey primer digunakan untuk mendapatkan data primer yang di butuhkan. Adapun data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan.

3.5.2 Survei Sekunder

Survei sekunder digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder di peroleh dari instansi terkait dalam hal ini BPS, Diskominfo, dan Instansi terkait lainnya. Data sekunder yang di butuhkan yaitu PDRB Kabupaten Indragiri Hulu dan Produk serta regulasi terkait dengan tujuan penelitian.

3.6 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability sampling dan Nonprobability sampling (Sugiyono,2011).

Menentukan sampel dalam suatu populasi memiliki aturan serta beberapa teknik tertentu dalam menentukannya. Pada dasarnya teknik sampling memiliki dua teknik yang dapat di gunakan untuk penarikan sampel, yaitu Probability sampling dan nonprobability sampling.

Sasaran dalam penelitian ini merupakan stakeholder – stakeholder yang terkait dengan pengelolaan sektor – sektor unggulan yang ada di kabupaten Indragiri Hulu yaitu baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta yang ikut mengelolak sektor – sektor potensial yang ada di kabupaten Indragiri Hulu. Penentuan sampel dalam al ini ialah *non-probability* sampling yaitu *puposif*

sampling. *Purposif* sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. *Purposif* sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010).

Pertimbangan dalam penentuan sampel dapat dilihat dari hubungan keterkaitan ataupun kepentingan sampel atau responden terhadap penelitian. Responden yang dipilih merupakan responden yang ahli di bidangnya. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 3.1 Responden Penelitian

Instansi	Kompetensi
Kantor Bupati	Berkompeten karena merupakan regulator dalam menentukan kebijakan – kebijakan dalam lingkup wilayahnya.
Dinas Komunikasi dan Informasi	Berkompeten dalam mengeluarkan data – data yang di perlukan peneliti.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Berkompeten dalam menyusun kebijakan terkait dengan strategi pengelolaan sektor potensial.
Dinas Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika	Berkompeten karena merupakan dinas – dinas yang menyusun program dan kebijakan dibidang sektor – sektor potensial.
Badan Pertnahan Nasional	Berkompeten karena merupakan badan yang mengatur tentang penataan penggunaan tanah.

Sumber : Hasil Analisis, 2018

3.7 Memetakan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tahap memetakan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu ini peneliti menggunakan analisis *ArcGis*. Dimana analisis *ArcGis* digunakan untuk memetakan persebaran sektor – sektor yang di anggap unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan data tataguna lahan di wilayah studi.

ArcGis merupakan software berbasis Geographic Information System (GIS) yang dikembangkan oleh ESRI (Environment Science & Research Institute). Produk utama *arcgis* terdiri dari tiga komponen utama yaitu : *ArcView* (Befungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan dan analisis), *ArcEditor* (berfungsi sebagai editor dari data spasial) dan *ArcInfo* (Merupakan fitur yang menyediakan fungsi – fungsi yang ada di dalam GIS yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur *Geoprocessing*).

ArcGis pertama kali diluncurkan kepada publik sebagai software yang komersial pada tahun 1999 dengan versi (*ArcGis* 8.0) dengan perkembangan dan tuntutan akan fitur yang dibutuhkan ESRI selalu memberikan pembahuruan pada *ArcGis*, pada saat ini telah keluar versi yang terbaru update 2016 yaitu (*ArcGis* 13.0), untuk penelitian ini peneliti menggunakan *ArcGis* 10.3.

3.8 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sektor Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu

Selanjutnya untuk mengetahui faktor – faktor apasaja yang mempengaruhi pengelolaan sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir 1988). Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

3.9 Strategi Meningkatkan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada tahap strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu ini, metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode LFA (*Logical Framewok Analysis*). LFA merupakan suatu instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian

tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek Lutfi , (2015).

LFA digunakan untuk menganalisis masalah yang diawali dengan menentukan masalah pokok dan masalah prioritas Adapun Prosedur dalam analisis LFA:

1. Mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan stakeholder terkait sesuai dengan permasalahan yang dibahas
2. Menganalisis informasi yang didapat dari stakeholder melalui wawancara, kemudian disusun suatu metode usaha-usaha untuk meningkatkan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu

Analisis LFA yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kinerja dalam pengelolaan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan sektor unggulan yang ada. Sehingga nantinya dengan melakukan analisis ini dapat menghasilkan sebuah strategi untuk meningkatkan pengelolaan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu kedepannya secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan PDRB kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Variabel Data	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis Data	Output
1.	Memetakan persebaran sektor – sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor – sektor unggulan di kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu • Sektor Pertanian • Sektor Perikanan • Sektor Kehutanan 	Data Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu • BPS Kabupaten Indragiri Hulu • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Overlay</i> • Deskriptif 	Terpetakannya persebaran dari sektor – sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
2.	Mengidentifikasi faktor – faktor pengelolaan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengorganisasian • Penggerakan • Pengawasan 	Data Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Indragiri Hulu • Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu • Dinas Kehutanan Provinsi Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif 	Teridentifikasinya faktor – faktor pengelolaan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.
3.	Bagaimana strategi meningkatkan pengelolaan sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan sektor unggulan • Faktor pengelolaan sektor unggulan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu 	Data Sekunder	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Logical Framework Approach (LFA)</i>. 	Strategi meningkatkan pengelolaan sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sumber: Hasil Analisis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1 : 50.000, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu secara geografis terletak pada $0^{\circ} 15'$ Lintang Utara, $1^{\circ} 5'$ Lintang Selatan, $101^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $102^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah adalah:

- Sebelah utara : Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah timur : Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah selatan : Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tebo;
- Sebelah barat : Kabupaten Kuantan Singingi.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 178 desa dan 16 kelurahan atau total desa dan kelurahan adalah 194 desa/kelurahan. Wilayah kecamatan sejumlah 14 kecamatan tersebut merupakan penetapan pada kondisi mutakhir tahun 2010, setelah pemekaran dari wilayah kecamatan sebelumnya. Catatan terakhir yang menunjukkan tentang pemekaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Batang Peranap merupakan pemekaran dari Kecamatan Peranap;
2. Kecamatan Rakit Kulim merupakan pemekaran dari Kecamatan Kelayang;

3. Kecamatan Sungai Lala dan Kecamatan Lubuk Batu Tinggal merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasir Penyau;
4. Kecamatan Rengat Barat dan Kecamatan Kuala Cenaku merupakan pemekaran dari Kecamatan Rengat;
5. Kecamatan Batang Gansal dan Kecamatan Batang Cenaku merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberida.

4.1.1 Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 3 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dimana ke 3 sektor unggulan ini yang mendominasi penggunaan lahan Kabupaten Indragiri Hulu, dari ke 3 sektor unggulan tersebut sektor pertanian yang mengalami perkembangan cukup pesat dari tahun 2017.

Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Sektor Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan 2017 (Ha).

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Peranap	7.698
2	Batang Peranap	9.606
3	Seberida	9.756
4	Batang Cenaku	17.331
5	Batang Gangsal	8.076
6	Kelayang	7.456

7	Rakit Kulim	5.519
8	Pasir Penyu	2.171
9	Lirik	3.514
10	Sungai Lala	1.912
11	Lubuk Batu Jaya	9.595
12	Rengat Barat	4.297
13	Rengat	1.510
14	Kuala Cenaku	1.740
Indragiri Hulu		90.181

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018

Dapat di lihat pada tabel 4.1 di atas tentang penggunaan lahan sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan tahun 2017. Kecamatan Batang Cenaku adalah kecamatan dengan luas penggunaan lahan sebagai sektor pertanian yang paling besar dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan luas lahan perikanan dapat di lihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Sektor Perikanan di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan 2017 (Ha).

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Peranap	0
2	Batang Peranap	833
3	Seberida	0
4	Batang Cenaku	0
5	Batang Gangsal	0
6	Kelayang	781
7	Rakit Kulim	584
8	Pasir Penyau	246
9	Lirik	1.229
10	Sungai Lala	0
11	Lubuk Batu Jaya	0
12	Rengat Barat	957
13	Rengat	1.190
14	Kuala Cenaku	1.014
	Indragiri Hulu	6.802

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018

Pada tabel 4.2 tentang penggunaan lahan sektor perikanan di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan tahun 2017, untuk sektor perikanan Kecamatan Rengat adalah Kecamatan yang paling besar dalam hal penggunaan lahan lahan sebagai lahan perikanan dari 14 kecamatan yang ada. Hal ini di karekana

penduduk Kecamatan Rengat sendiri masih banyak yang mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap melihat kondisi geografis kecamatan ini dekat dengan sungai Indragiri, begitu juga perikanan budidaya penduduk kecamatan ini juga banyak yang melakukan aktifitas sebagai pembudidaya ikan. Untuk penggunaan lahan pada sektor unggulan kehutanan dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan 2017 (Ha).

No	Kecamatan	2017
1	Peranap	86.061
2	Batang Peranap	104.885
3	Seberida	23.670
4	Batang Cenaku	67.205
5	Batang Gangsal	28.854
6	Kelayang	16.624
7	Rakit Kulim	36.860
8	Pasir Penyu	0
9	Lirik	9.034
10	Sungai Lala	0
11	Lubuk Batu Jaya	0
12	Rengat Barat	41.025
13	Rengat	0
14	Kuala Cenaku	46.567
Indragiri Hulu		460.675

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018

Pada tabel 4.3 penggunaan lahan sektor kehutanan di Kabupaten Indragiri Hulu perkecamatan 2017. Dapat di lihat pada table di atas bahwasannya Kecamatan Batang Peranap adalah kecamatan yang masih memiliki bentang hutan yang sangat luas yaitu 104.885 Ha.

4.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebanyak 388.916 jiwa dan pada tahun 2017 naik menjadi 425.897 jiwa. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2012-2017 dapat dilihat pada table 4.4 berikut

Tabel. 4.4 Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2012 - 2017.

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Peranap	29.490	30.283	30.812	31.467	31.105	32.733
2	Batang Peranap	9.484	9.896	9.841	10.050	10.254	10.454
3	Seberida	51.620	55.485	51.893	52.997	54.071	55.129
4	Batang Cenaku	30.156	31.246	31.103	31.765	32.409	33.043
5	Batang Gangsal	31.048	31.281	32.160	32.844	33.510	34.165

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	Kelayang	22.725	23.343	22.909	23.396	23.872	24.338
7	Rakit Kulim	21.788	22.778	22.079	22.549	23.006	23.456
8	Pasir Penyau	32.684	33.816	34.031	34.755	35.460	36.153
9	Lirik	24.720	25.229	25.545	26.088	26.617	27.137
10	Sungai Lala	13.384	13.796	14.070	14.369	14.661	14.946
11	Lubuk Batu Jaya	19.769	20.417	20.004	20.430	20.844	21.252
12	Rengat Barat	42.189	42.963	43.691	44.621	45.526	46.415
13	Rengat	47.505	48.026	50.038	51.104	52.140	53.158
14	Kuala Cenaku	12.354	12.642	12.724	12.996	13.258	13.518
Indragiri Hulu		388.916	401.201	400.901	409.431	417.733	425.897

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2018

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks rasio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,35 artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel. 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Peranap	16.765	15.968	32.733	104.99
2	Batang Peranap	5.406	5.048	10.454	107.09
3	Seberida	28.808	26.321	55.129	109.45
4	Batang Cenaku	17.170	15.873	33.043	108.17
5	Batang Gangsal	17.902	16.263	34.165	110.08
6	Kelayang	12.396	11.942	24.338	103.80
7	Rakit Kulim	11.936	11.520	23.456	103.61
8	Pasir Penyu	18.341	17.812	36.153	102.97
9	Lirik	14.051	13.086	27.137	107.37
10	Sungai Lala	7.617	7.329	14.946	103.93
11	Lubuk Batu Jaya	11.023	10.229	21.252	107.76
12	Rengat Barat	23.864	22.551	46.415	105.82
13	Rengat	26.333	26.825	53.158	98.17
14	Kuala Cenaku	6.884	6.634	13.518	103.77
Indragiri Hulu		218.496	207.401	425.897	105.35

Sember: BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2018

Sedangkan jika di lihat dari jumlah rumah tangga, adapun jumlah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu 103.300 rumah tangga pada tahun 2017

dengan rata – rata keseluruhan per rumah tangga yaitu 4 jiwa per rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel. 4.6 Jumlah Penduduk dan Rumah tangga Menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk Per Rumah Tangga
1	Peranap	32.733	8.064	4
2	Batang Peranap	10.454	2.582	4
3	Seberida	55.129	14.026	4
4	Batang Cenaku	33.043	8.308	4
5	Batang Gangsal	34.165	8.370	4
6	Kelayang	24.338	5.651	4
7	Rakit Kulim	23.456	5.472	4
8	Pasir Penyau	36.153	8.531	4
9	Lirik	27.137	6.725	4
10	Sungai Lala	14.946	3.398	4
11	Lubuk Batu Jaya	21.252	5.450	4
12	Rengat Barat	46.415	11.030	4
13	Rengat	53.158	12.324	4
14	Kuala Cenaku	13.518	3.369	4
	Total	425.897	103.300	4

Sember: BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2018

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu dari Tahun 2012 – 2017 terus meningkat dan sampai pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 51 orang/km², untuk data kepadatan penduduk dapat di lihat pada tabel 4.7 berikut.

**Tabel. 4.7 Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
 2012 –2017**

No	Tahun	Kepadatan Penduduk
1.	2012	46.82
2.	2013	47.86
3.	2014	48.90
4.	2015	49.94
5.	2016	50.95
6.	2017	51.94

Sember: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

4.3 Ekonomi

Kabupaten Indragiri adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki kondisi perekonomian yang hampir sama dengan setiap kondisi perekonomian kabupaten kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya masih bermata pencaharian melalui aktivitas pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 3 sektor yang di jadikan sektor unggulan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor kehutanan .

4.3.1 PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004).

Dalam penelitian ini peneliti tidak membahas PAD secara luas, PAD yang di gunakan dalam penelitian ini hanyalah retribusi dari sektor yang di anggap unggulan yakni retribusi dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk mengetahui retribusi dari sektor unggulan pada PAD di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2012 – 2017 dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Retribusi Sektor Unggulan Pada PAD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 – 2017 (juta rupiah).

No.	Tahun	Jumlah Retribusi
1.	2012	59.350.000,00
2.	2013	66.750.000,00
3.	2014	69.650.000,00
4.	2015	74.040.000,00
5.	2016	60.025.000,00
6.	2017	98.465.524,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2017.

4.3.2 Tenaga Kerja

Menurut Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

Untuk data tenaga kerja yang bekerja di di sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2012 – 2017 dapat di lihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri - Hulu tahun 2012 – 2017.

No.	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
1.	2012	19.657
2.	2013	19.853
3.	2014	20.052
4.	2015	20.253
5.	2016	20.455
6.	2017	20657

Sumber: Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Indragiri Hulu 2017.

4.3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam tahun tertentu. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha atau sektor. Pemecahan menjadi subsektor ataupun golongan ini disesuaikan danga Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan pada tabel 4.10 berikut ini beserta PDRB Provinsi Riau sebagai acuan.



Tabel 4.10 PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.196.680,79	10.015.106,70	10.692.978,16	11.167.249,18
B	Pertambangan dan Penggalian	9.968.694,74	3.735.297,95	3.744.246,73	3.713.156,53
C	Industri Pengolahan	8.789.083,99	9.700.960,36	10.567.967,60	11.040.993,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.374,33	15.929,73	21.455,91	24.986,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.801,06	15.492,97	15.976,65	16.520,89
F	Konstruksi	4.277.275,18	4.897.100,49	5.246.605,75	5.581.420,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.066.429,49	3.458.570,58	3.799.942,73	4.083.075,32
H	Transportasi dan Pergudangan	340.715,09	374.291,61	398.143,66	419.566,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	292.940,31	277.825,03	302.768,76	326.684,79
J	Informasi dan Komunikasi	190.621,82	214.189,93	234.770,40	261.356,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	318959,51	325.640,45	342.410,62	356.679,27

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
L	Real Estat	382.293,35	439.097,62	469.484,37	489.519,33
MN	Jasa Perusahaan	1.004,25	1.129,40	1.221,90	1.333,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	518.143,56	562.355,60	580.959,40	598.060,02
P	Jasa Pendidikan	217.552,47	253.634,67	277.567,14	294.201,66
Q	Jasa Kesehatan dan KEgiatan Sosial	55.368,21	67.777,47	72.832,58	78.246,57
RSTU	Jasa Lainnya	195.344,03	229.195,08	261.879,50	285.232,84
	Jumlah	33.762.481,76	34.583.595,62	37.031.211,86	38.738.283,90

Sumber: PDRB Kabupaten Indragiri Hulu menurut lapangan usaha, 2018

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx}Angka Sangat Sementara

Tabel 4.11 PDRB Provinsi Riau Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.550	144.219	156.826	166.772
B	Pertambangan dan Penggalian	268.820	201.979	191.971	182.968
C	Industri Pengolahan	141.875	155.686	168.242	178.589
D	Pengadaan Listrik dan Gas	230	311	396	444
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66	72	76	81
F	Konstruksi	45.438	51.673	57.000	61.897
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	52.896	57.953	63.957	69.034
H	Transportasi dan Pergudangan	4.458	5.185	5.5640	6.039
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.163	3.342	3.610	3.816
J	Informasi dan Komunikasi	3.539	4.077	4.371	4.753
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.430	5.665	6.141	6.254
L	Real Estat	4.659	5.405	5.791	6.085

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
MN	Jasa Perusahaan	28	32	35	38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.247	10.077	10.393	10.665
P	Jasa Pendidikan	2.760	3.267	3.459	3.648
Q	Jasa Kesehatan dan KEgiatan Sosial	955	1.176	1.224	1.315
RSTU	Jasa Lainnya	2.308	2.824	3.160	3.480
	Jumlah	679.498	652.762	682.291	705.679

Sember : PDRB Provinsi Riau menurut lapangan usaha, 2018

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,60	2,07	3,13	3,31
B	Pertambangan dan Penggalian	2,57	-40,73	-3,82	-2,35
C	Industri Pengolahan	6,77	6,52	5,95	6,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,98	9,69	16,33	3,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	2,03	-0,67	1,79
F	Konstruksi	6,47	6,26	4,14	4,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,79	4,10	5,65	5,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,41	4,76	2,16	2,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,37	3,59	4,19	4,51
J	Informasi dan Komunikasi	6,79	7,98	6,44	7,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	-1,83	0,84	-0,09
L	Real Estat	7,64	7,49	2,09	2,64

Kategori	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
MN	Jasa Perusahaan	6,67	6,56	4,04	6,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	4,96	0,19	1,46
P	Jasa Pendidikan	4,83	6,70	2,12	4,58
Q	Jasa Kesehatan dan KEgiatan Sosial	7,54	9,87	1,29	5,20
RSTU	Jasa Lainnya	10,47	8,53	6,68	6,71
	Jumlah	5,53	-2,94	3,68	4,02

Sumber: PDRB Kabupaten Indragiri Hulu menurut lapangan usaha, 2018

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang beribu kota kan Rengat. Indragiri Hulu memiliki wilayah berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa – rawa dengan ketinggian 5 – 100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah 8.198,26 km² (819.826,0 Ha). Kabupaten Indragiri Hulu telah berkembang dan tumbuh dengan cukup baik, perkembangan tersebut tidak lepas dari perkembangan sektor – sektor penyusunan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu

Identifikasi sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu, dapat diidentifikasi berdasarkan data PDRB Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

Tabel 5.1. PDRB dan Persentase Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sektor	Tahun				Persentase			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan Perikanan	9.196.680,79	10.015.106,70	10.692.978,16	11.167.249,18	27,24	28,96	28,88	28,83
2	Industri Pengolahan	8.789.083,99	9.700.960,36	10.567.967,60	11.040.993,03	26,03	28,05	28,54	28,50
3	Konstruksi	4.277.275,18	4.897.100,49	5.246.605,75	5.581.420,72	12,67	14,16	14,17	14,41
4	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.066.429,49	3.458.570,58	3.799.942,73	4.083.075,32	9,08	10,00	10,26	10,54
5	Pertambangan dan Penggalian	9.968.694,74	3.735.297,95	3.744.246,73	3.713.156,53	29,53	10,80	10,11	9,59
6	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	518.143,56	562.355,60	580.959,40	598.060,02	1,53	1,63	1,57	1,54
7	Real Estat	382.293,35	439.097,62	469.484,37	489.519,33	1,13	1,27	1,27	1,26
8	Transportasi dan Pergudangan	340.715,09	374.291,61	398.143,66	419.566,94	1,01	1,08	1,08	1,08
9	Jasa Keuangan dan Asuransi	318.959,51	325.640,45	234.770,40	356.679,27	0,94	0,94	0,63	0,92
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	292.940,31	277.825,03	302.768,76	326.684,79	0,87	0,80	0,82	0,84
11	Jasa Pendidikan	217.552,47	253.634,67	277.567,14	294.201,66	0,64	0,73	0,75	0,76
12	Jasa Lainnya	195.344,03	229.195,08	261.879,50	285.232,84	0,58	0,66	0,71	0,74
13	Informasi dan Komunikasi	190.621,82	214.189,93	234.770,40	261.356,07	0,56	0,62	0,63	0,67
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55.368,21	67.777,47	72.832,58	78.246,57	0,16	0,20	0,20	0,20
15	Pengadaan Listrik dan Gas	10.374,33	15.929,73	21.455,91	24.986,89	0,03	0,05	0,06	0,06
16	Pengadaan Air, Pengelolaan	14.801,06	15.492,97	15.976,65	16.520,89	0,04	0,04	0,04	0,04

No	Sektor	Tahun				Persentase			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	Sampah, Limbah Daur Ulang								
17	Jasa Perusahaan	1.004,25	1.129,40	1.221,90	1.333,84	0,003 0	0,003 3	0,003 3	0,003 4
	Jumlah	33.762.48 1,76	34.583.59 5,62	37.031.21 1,86	38.738.28 3,90	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 5.1. dapat di lihat hasil produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hulu dari Tahun 2014 sampai 2017 mendapatkan nilai tertinggi secara berturut-turut, dengan persentase 27,24%, 28,96%, 28,88% dan 28,83%. Hasil produksi pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan hasil produksi yang besar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sektor tersebut. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu di susun melalui RENSTRA Dinas Pertranian dan Perikanan 2016-2021, serta RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019.

5.2 Memetakan Persebaran dari Sektor – Sektor Unggulan Yang Ada di Kabupaten Indragiri Hulu

Pada bab ini disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang kajian peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu yang mana Kabupaten Indragiri Hulu adalah ikon perkebunan yang ada di Provinsi Riau menurut kepala dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi dengan mendapat julukan ikon perkebunan justru kabupaten ini

memiliki PDRB yang sangat rendah menurut data PDRB Provinsi Riau per kabupaten, Kabupaten Indragiri Hulu berada di urutan ke 8 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta mengatasi masalah yang ada di dalam pengelolaan tersebut.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, memiliki 3 sektor unggulan yakni sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di dapatkan jumlah luas lahan yang di peruntukkan sebagai lahan sektor unggulan yakni sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan yang telah di cantumkan pada bab IV.

Berdasarkan data luas lahan tersebut di tambah dengan peta RTRW peruntukan lahan kabupaten dapat di gambarkan persebaran sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yakni sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Namun berdasarkan wawancara dengan pihak – pihak terkait dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu di sebutkan bahwa di sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet terjadi masalah yakni usia dari perkebunan tersebut sudah memasuki fase yang tidak produktif sehingga terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan.

Dapat kita lihat di peta persebaran sektor unggulan di Kabupaten Indragiri hulu terdapat beberapa lahan sub sektor perkebunan yang sudah tidak produktif di berbagai kecamatan dengan luas total luas keseluruhan sebesar

27.054 Ha atau 30% dari luas lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk melihat rincian jumlah lahan yang tidak produktif perkecamatan dapat di lihat pada table 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Luas Lahan yang Tidak Produktif Berdasarkan Hasil Wawancara di Kabupaten Indragiri Hulu (Ha)

No	Kecamatan	Luas Lahan
1	Peranap	1.724
2	Batang Peranap	6.582
3	Seberida	5.015
4	Batang Cenaku	6.998
5	Batang Gangsal	0
6	Kelayang	0
7	Rakit Kulim	976
8	Pasir Penyu	832
9	Lirik	0
10	Sungai Lala	1.995
11	Lubuk Batu Jaya	0
12	Rengat Barat	0
13	Rengat	0
14	Kuala Cenaku	2.932
TOTAL		27.054

Sumber: Sumber : Hasil Analisis, 2019

Pada tabel 5.2 telah di rincikan tentang luas lahan kawasan perkebunan yang menjadi subsektor dari sektor pertanian yang mengalami atau memasuki fase yang tidak produktif terjadi di 8 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, hal inilah yang menjadi masalah utama dari rendahnya PDRB yang di hasilkan Kabupaten Indragiri Hulu.

5.2.1 Sektor-sektor Unggulan Kabupaten Indragiri Hulu

Sektor-sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 3 sektor utama jika dilihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto yaitu sektor

pertanian, perikanan dan kehutanan. Setiap sektor-sektor unggulan tersebar di beberapa titik di setiap kecamatan. Persebarannya bervariasi ada yang memiliki ke 3 (tiga) sektor di satu kecamatan dan ada juga yang hanya memiliki 1 (satu) sektor unggulan di kecamatannya. Berikut ini luas lahan dari setiap sektor-sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu :

Tabel 5.3 Persebaran Luas Lahan Sektor-sektor Unggulan Indragiri Hulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Sektor Pertanian (Ha)	Sektor Perikanan (Ha)	Sektor Kehutanan (Ha)
1	Peranap	7.698	0	86.061
2	Batang Peranap	9.606	833	104.885
3	Seberida	9.756	0	23.670
4	Batang Cenaku	17.331	0	67.205
5	Batang Gangsal	8.076	0	28.854
6	Kelayang	7.456	781	16.624
7	Rakit Kulim	5.519	584	36.860
8	Pasir Penyau	2.171	246	0
9	Lirik	3.514	1.229	9.034
10	Sungai Lala	1.912	0	0
11	Lubuk Batu Jaya	9.595	0	0
12	Rengat Barat	4.297	957	41.025
13	Rengat	1.510	1.190	0
14	Kuala Cenaku	1.740	1.014	46.567
Indragiri Hulu		90.181	6.802	460.675

Sumber : Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 Dapat dilihat persebaran luas lahan di setiap sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga nantinya dapat digambarkan melalui peta Sektor-sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan luas lahan dan setiap sektor yang dimiliki di Kecamatan-kecamatan yang ada



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

5.2.1.1 Sektor Pertanian

Kondisi sektor unggulan pertanian Kabupaten Indragiri Hulu tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan wilayah pertanian sebesar 90.181 Ha. Jika dilihat dari peta sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai lahan paling besar ke 2 (dua) diantara sektor-sektor unggulan yang lainnya. Persebaran luasan wilayah sektor pertanian di Indragiri Hulu tidak terjadi secara merata.

Jenis pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi dua, yaitu pertanian dan perkebunan. Jenis-jenis pertanian serta perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri hulu dapat di lihat pada table 5.4 berikut:

Tabel 5.4 Jenis-jenis Pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Pertanian	Perkebunan
1	Padi	Durian
2	Kacang Panjang	Jengkol
3	Cabai	Jeruk Siam
4	Terung	Pisang
5	Ketimun	Rambutan
6	Kangkung bayam	Nanas
7		Kedelai
8		Jagung
9		Ubi Kayu
10		Ubi Jalar
11		Kacang Tanah
12		Kacang Hijau
13		Karet
14		Kelapa
15		Kelapa Sawit
16		Kopi
17		Pinang
18		Kakao

Sumber: Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Cenaku merupakan kecamatan yang mempunyai lahan pertanian paling besar dengan luas wilayah 17.331 Ha. Dengan besarnya wilayah pertanian di Kecamatan Batang Cenaku harusnya menjadi wilayah yang mempunyai produksi dibidang pertanian paling besar juga. Sehingga potensi sektor unggulan tersebut dapat di maksimalkan dengan baik.

Berbeda dengan Kecamatan Batang Cinaku, Kecamatan Rengat mempunyai luas lahan sektor pertanian paling kecil diantara 14 kecamatan yang ada, dengan luas lahan pertanian sebesar 1.510 Ha. Kecilnya luas lahan pertanian di Kecamatan Rengat tentunya dipengaruhi oleh wilayah administrasi Kecamatan Rengat sebagai Ibu Kota Kecamatan yang tentunya lebih berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Meskipun demikian tentunya pemenuhan kebutuhan produksi pertanian di Kecamatan Rengat sebagai sektor unggulan masih bias di jalankan dengan luas lahan yang ada.

5.2.1.2 Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu, seiktor perikanan yang di Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 2 bagian yaitu perikanan tangkap serta prtikanan budidaya. Jika dilihat dari luas lahan sektor perikanan merupakan sektor unggulan yang mempunyai lahan paling terkecil diantara sektor-sektor unggulan lainnya dengan luas lahan 6.802 Ha. Selain merupakan sektor unggulan yang mempunyai lahan terkecil

sektor perikanan juga tidak tersebar di semua Kecamatan yang ada di Indragiri Hulu.

Dari 14 kecamatan di Indragiri Hulu, terdapat 6 kecamatan yang tidak mempunyai lahan perikanan yaitu Kecamatan Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gangsal, Sungai Lala dan Lubuk Batu Jaya. Dengan demikian hanya 8 kecamatan yang mempunyai lahan perikanan di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu sektor unggulan, kecamatan tersebut adalah Kecamatan Batang Peranap, Kelayang, Rakit Kulim, Pasir Penyau, Lirik, Rengat Barat, Rengat, Kuala Cenaku.

Berdasarkan luas lahan yang terbagi di 8 kecamatan, Kecamatan Lirik adalah kecamatan yang mempunyai lahan perikanan yang paling besar dengan luas lahan 1.229 Ha. Sedangkan Kecamatan Pasir Penyau adalah daerah yang mempunyai lahan perikanan paling kecil dengan luas lahan sebesar 246 Ha. Dengan tidak meratanya peredaran lahan perikanan sebagai sektor unggulan tentunya mempengaruhi produksi di bidang perikanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

5.2.1.3 Sektor Kehutanan

Dihat dari luas lahan sektor kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, adalah sektor unggulan yang mempunyai lahan paling besar diantara sektor-sektor unggulan lainnya, hutan yang menjadi sumber pendapatan yakni hanyalah hutan yang memiliki status Hutan Tanam Industri (HTI) dan Hutan ulayat yang di kelola oleh masyarakat adat. Sektor kehutanan Indragiri Hulu mempunyai luas lahan sebesar 460.675 Ha. Namun meskipun mempunyai lahan paling terbesar sebagai

sektor unggulan, sektor kehutanan Indragiri Hulu hanya tersebar di beberapa kecamatan yang ada.

Terdapat 4 (empat) kecamatan yang tidak mempunyai lahan kehutanan di Indragiri Hulu yaitu Kecamatan Pasir Penyau, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya dan Rengat, sehingga produksi sektor kehutanan tidak ada di kecamatan tersebut. Dengan demikian sektor kehutanan hanya terdapat di 10 kecamatan di Indragiri Hulu. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Peranap, Batang Peranap, Sebrida, Batang Cenaku, Batang Gangsal, Kelayang, Rakit Kulim, Lirik, Rengat Barat, dan Kuala Cenaku.

Dari 10 Kecamatan yang memiliki lahan sektor kehutanan, Kecamatan Batang Peranap memiliki lahan kehutanan yang paling besar yaitu dengan luas lahan sebesar 104.885 Ha. Sebagai wilayah terbesar yang memiliki luas lahan sektor kehutanan, sektor unggulan tersebut tentunya harus dimaksimal dan harus bisa menjadi sektor utama di kecamatan tersebut sehingga produksinya dapat meningkatkan produksi sektor unggulan di Indragiri Hulu secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan paling kecil yaitu Kecamatan Lirik dengan luas lahan kehutanan sebesar 9.034 Ha.

5.3 Mengidentifikasi Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan data tahun 2016 dan 2017 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Indragiri Hulu tergolong ke dalam kabupaten yang memiliki PDRB cukup rendah di Provinsi

Riau, Kabupaten Indragiri Hulu yang di juluki sebagai salah ikon perkebunan di Provinsi Riau .

Akan tetapi julukan ini tidak sesuai dengan PDRB yang di hasilkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu hanya berada di urutan ke 8 dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri hulu.

Pada sub bab ini peneliti akan menganalisi atau mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi PDRB kabupaten Indragiri Hulu, yang berfokus ke pengelolaan sektor unggulan yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif, teori menurut George R. Terry (2006) dan menggunakan data resntra kabupaten Indragiri Hulu yang di susun oleh Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan untuk renstra sektor kehutanan langsung di susun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Menurut Teori George R. Terry (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi 4 hal yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*).

5.3.1 Perencanaan (*Planning*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Indragiri Hulu yaitu perencanaan pengelolaan sektor-sektor unggulan. Perencanaan sektor-sektor unggulan di Indragiri Hulu sebagian besar sudah tertuang dalam dokumen RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-

2021 yang telah disusun. Didalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 terdapat program-program utama dalam pengelolaan sektor unggulan yang ada di Indragiri Hulu diantaranya sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Segala upaya dalam peningkatan dan pengelolaan tersusun berdasarkan program-program yang baik. Berikut ini adalah program-program yang ada dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 Indragiri Hulu :

5.3.1.1 Program Sektor Pertanian

Sebagai salah satu sektor unggulan di Indragiri Hulu, dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 terdapat beberapa program utama sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan program ini mempunyai beberapa sasaran yaitu yang pertama terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan program ini mempunyai sasaran yaitu terwujudnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
- c. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan program ini mempunyai tujuan yaitu meningkatnya produksi hasil pertanian/perkebunan.

Berdasarkan program-program yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021, Sektor unggulan pertanian memiliki 3 (tiga) tahapan utama yaitu ketahanan pangan,

penerapan teknologi dan peningkatan produksi. Dalam program peningkatan ketahanan pangan merupakan program yang bermaksud menjaga kondisi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dari sektor pertanian. Sehingga ketersediaan hasil produksi sektor pertanian dapat bermanfaat dengan maksimal terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di Indragiri Hulu.

Sementara program sektor pertanian selanjutnya, pemerintah Indragiri Hulu berusaha menerapkan teknologi-teknologi dalam sektor pertanian, sehingga kinerja masyarakat dalam mengelola lahan pertanian yang pada awalnya masih menggunakan alat-alat dan teori tradisional dapat di tingkatkan dengan menggunakan teknologi, dengan demikian kinerja masyarakat dalam berjalan secara optimal.

Program ke 3 (tiga) dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 di sektor pertanian yaitu peningkatan produksi hasil pertanian. Setelah dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dan penggunaan teknologi-teknologi terbaru peningkatan hasil pertanian tentunya juga menjadi fokus utama. Sebagai salah satu sektor unggulan peningkatan hasil produksi akan berdampak positif terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

5.3.1.2 Program Sektor Perikanan

Perencanaan sektor unggulan kedua yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 memiliki beberapa program yang di harapkan mampu meningkatkan

produksi sektor unggulan di dalam sektor perikanan, program – program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan budidaya perikanan program ini mempunyai tujuan yaitu meningkatnya budidaya perikanan.
2. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan program ini mempunyai tujuan yaitu mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Sebagai sektor unggulan yang mempunyai luas lahan paling kecil, program-program dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 lebih berfokus pada pengembangan budidaya perikanan, dengan tujuan meningkatkan budaya perikanan yang ada sehingga produksi sektor perikanan dapat di tingkatkan sehingga dapat meningkatkan PDRB Indragiri Hulu.

Selain berfokus dalam pengembangan, program selanjutnya juga berfokus pada optimalisasi dan pemasaran produksi perikanan. Sehingga masyarakat yang mempunyai lahan perikanan mempunyai pasar yang baik sehingga siklus dalam pengelolaan dan hasil produksi berjalan dengan baik.

5.3.1.3 Program Sektor Kehutanan

Sedangkan pada perencanaan sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini tertuang dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019dimana menurut keterangan dari Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Indragiri Hulu semua yang berkenaan dengan kehutanan yang ada di Provinsi Riau saat ini langsung di bawah kendali Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maka dari itu untuk program perencanaan sektor kehutanan ini di susun dalam dokumen renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau, program – program tersebut ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan program ini mempunyai tujuan yaitu memfasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm, HTR, HR, dll).
2. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat program ini mempunyai tujuan yaitu menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat.

Sebagai sektor unggulan yang mempunyai lahan terbesar di Indragiri Hulu, sektor kehutanan mempunyai program yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan lahan yang ada. Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Penyediaan bibit tanaman kehutanan untuk masyarakat yang menggunakan lahan tersebut, berupaya menjaga habitat kehutanan yang mempunyai nilai produksi yang tinggi. Selain itu program penyediaan bibit akan membantu hasil produksi di sektor kehutanan, sehingga ketersediaan lahan untuk sektor kehutanan dapat di maksimalkan. Dengan demikian hasil produksi kehutanan akan

meningkat dan dengan otomatis akan dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

5.3.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian di sektor-sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu, di jalankan oleh Dinas terkait. Pembagian tugas berdasarkan sektor unggulan agar program-program yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik. Berikut pengorganisasian sektor-sektor unggulan di Indragiri Hulu

5.3.2.1 Sektor Pertanian

Untuk pengorganisasian sektor unggulan sektor pertanian Kabupaten Indragiri Hulu juga tertuang dalam dokumen RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021. Tugas pokok Dinas Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang Pertanian dan Perikanan
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Perikanan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Perikanan
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pertanian Dan Perikanan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretariat, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD). Masing – masing unit kerja tersebut diatas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pertanian Dan Perikanan. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan Bidang Perkebunan, Bidang Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap, Bidang Produksi, Pembibitan dan Pengembangan Pakan Ternak, Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dan Perikanan, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dan Perikanan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan, bidang produksi perikanan budidaya dan tangkap, bidang produksi, pembibitan dan pengembangan pakan ternak, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, bidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dan perikanan
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang perkebunan, bidang produksi perikanan budidaya dan tangkap, bidang produksi, pembibitan dan pengembangan pakan ternak, bidang tanaman pangan dan

- hortikultura, bidang sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, bidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dan perikanan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perkebunan, bidang produksi perikanan budidaya dan tangkap, bidang produksi, pembibitan dan pengembangan pakan ternak, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, bidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dan perikanan
 - d. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian Dan Perikanan
 - f. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Dan Perikanan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum dan perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pertanian Dan Perikanan

- c. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. Pembinaan pegawai;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana
- f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- g. Pengelolaan keuangan
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang menyelenggarakan urusan pada seksi produksi perkebunan, seksi perlindungan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyenggarakan perencanaan pada seksi produksi perkebunan, seksi perlindungan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada seksi produksi perkebunan, seksi perlindungan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi produksi perkebunan, seksi perlindungan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi produksi perkebunan, seksi perlindungan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala bidang yang menyelenggarakan urusan pada seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
- b. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kerja bidang
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- d. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3.2.2 Sektor Perikanan

Di Kabupaten Indragiri Hulu untuk sektor unggulan perikanan masih berada satu atap dengan pertanian yaitu dinas pertanian dan perikanan, hanya saja di bedakan oleh kepala bagian saja. Dan susunan pengorganisasian dalam sub sektor perikanan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang menyelenggarakan urusan pada seksi produksi perikanan, seksi perbenihan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud bidang perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perencanaan pada seksi produksi perikanan, seksi perbenihan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada seksi produksi perikanan, seksi perbenihan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi produksi perikanan, seksi perbenihan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi produksi perikanan, seksi perbenihan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.3.2.3 Sektor Kehutanan

Dalam pengorganisasian sektor unggulan kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu tertuang di dalam dokumen RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019 dimana seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa untuk urusan sektor kehutanan ini semuanya sudah di ambil alih oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi

Riau Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

2. Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3.3 Penggerakan (*Actuating*)

Dalam penggerakan atau kegiatan dari program – program yang telah di susun oleh dinas – dinas terkait sesuai dengan sub sektornya masing – masing juga tertuang dalam dokumen RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 yang mana penggerakan atau kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.3.1 Sektor Pertanian

Penggerakan pada sektor unggulan pertanian berdasarkan program-program yang telah disusun dan keselarasan dengan fungsi pengorganisasian yang ada.

1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan memiliki beberapa pergerakan/kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan meliputi peningkatan produksi pertanian padi, jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan. Peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan tahapan-tahapan penyusunan database potensi produk pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan perbenihan / perbibitan, penyusunan action plan pengembangan kawasan pertanian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan menghasilkan produk seperti, buku statistic pertanian dan database kelompok tani, tersedianya sarana dan prasana pasca panen pertanian berdasarkan jenis produksinya seperti padi, jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan.

2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan memiliki tujuan untuk meingkatkan produksi bidang pertanian dan efesiensi pengerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam peningkatan produksi dengan menerapkan teknologi pertanian/perkebunan sebagai berikut :

Penerapan sarana dan prasaran teknologi pertanian tepat guna seperti pengaturan embung, saluran irigasi, TAM, pintu air dan saung tani, kemudian dilakukan penyediaan alat dan mesin.

3. Pada program peningkatan produksi pertanian/perkebunan memiliki jenis produk utama yaitu padi, jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan pada sektor pertanian dan pada sektor perkebunan terfokus pada produksi perkebunan karet dan sawit. Pergerakan yang dilakukan meliputi beberapa hal didalamnya.
 - a. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan menyediakan saprodi unuk kelompok tani berdasarak jenis produksinya.
 - b. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan memelihara dan membangun pembibitan kelapa sawit dan karet unggul berdasarkan kelompok tani.
 - c. Melakukan monitoring setiap bualan, evaluasi kegiatan-kegiatan kelompok tani.
 - d. Pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura dengan menyediakan teknologi pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman perkebunan dan pertanian.

5.3.3.2 Sektor Perikanan

Sama seperti sektor pertanian pada sub sektor perikana juga dalam penyusunan kegiatan – kegiatan untuk merealisasikan program program yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga tertuang dalam

RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 yang mana kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan budidaya perikanan ini memiliki beberapa penggerakan/kegiatan antara lain:
 - a. Pengembangan bibit ikan unggul dengan meningkatkan jumlah produksi bibit unggul.
 - b. Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan melakukan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat dan pengembangan produksi.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkat produksi dengan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan ini memiliki beberapa penggerakan/kegiatan antara lain:
 - a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perikanan dengan memberikan informasi kepada kelompok-kelompok budidaya perikanan tentang permintaan pasar.
 - b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan dengan menyediakan alat-alat peningkatan produksi pasca panen dan pengolahan hasil panen perikanan.

5.3.3.3 Sektor Kehutanan

Pada sektor kehutanan ini seperti yang sudah di jelaskan juga bahwa untuk urusan sub sektor kehutanan langsung di komandoi oleh Dinas Kehutana Provinsi Riau, maka dari itu untuk kegiatan yang ada seputar sub sektor kehutanan tertuang dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019 yang mana kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada program meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan ini memiliki beberapa pergerakan/kegiatan antara lain:
 - a. Mengajak dan melibatkan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman hutan sesuai dengan undang-undang berdasarkan tanaman-tanaman hutan produksi legal.
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pemantauan penyediaan sumber benih tanaman hutan produksi yang legal.

5.3.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *Controlling* pada sektor – sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu yakni sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dilakukan dengan memantau atau mengevaluasi perkembangan/keberhasilan melalui indikator kinerja setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan keberhasilan program – program yang telah di susun dan di laksanakan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas dari sektor – sektor unggulan yang ada.

Indikator kinerja setiap SKPD yang berkaitan dengan sektor – sektor unggulan ini dapat di lihat pada data target pencapaian setiap tahun, dengan cara membandingkan antara pencapaian setiap tahunnya dengan target yang telah di tetapkan pada saat perumusan RPJM. Pengawasan atau *Controlling* ini di lakukan di semua sektor unggulan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

5.3.5 Dekriptif

Berdasarkan Rencana Strategis RENSTRA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 maupun RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014-2019. Kabupaten Indragiri Hulu sudah menerapkan pengelolaan yang baik sesuai dengan teori George R. Terry (2006). Dimana Geogrg R. Terry mengatakan bahwa pengelolaan yang baik meliputi antara lain Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizin*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).

Namun dengan menerapkan pengelolaan yang baik menurut data Provinsi Riau dalam angka 2017, Kabupaten Indragiri Hulu masih tergolong kedalam kabupaten yang memiliki PDRB yang cukup rendah dari 12 kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau. Jika dilihat dari program dan kegiatan yang ada Indragiri Hulu ada program utama yang telah disusun tetapi tidak didukung oleh kegiatan yang ada di perorganisasian. Hal ini tentunya akan menghambat peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan.

Program – program serta kegiatan yang telah di susun ternyata belum mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri

Hulu, menurut hasil analisis deskriptif ini peneliti mengasumsikan bahwa program yang ada dalam meningkatkan produksi sektor unggulan sudah tepat sasaran akan tetapi program yang sudah ada masih belum cukup efisien atau masih terlalu lamban untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu yang rendah.

Hal ini di karenakan kurangnya pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan kegiatan dari program yang telah di rencanakan. Kemudian tidak semua program unggulan melakukan kegiatan evaluasi setiap kegiatan untuk mencapai program yang telah dibuat. Sehingga tidak dapat dilihat seberapa besar program itu berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

5.4 Strategi Meningkatkan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu.

5.4.1 Analisis Permasalahan

Analisis masalah dilakukan dengan melihat jumlah PDRB yang di hasilkan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah, lalu di lanjutkan dengan menggunakan data BPS provinsi yang mana dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yakni 12 kabupaten/kota, Kabupaten Indragiri Hulu menempati urutan ke 8 dalam jumlah penghasil PDRB dalam artian Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki jumlah PDRB ke 5 terendah se provinsi Riau.

Sebagai mana yang telah di sebutkan di dalam data Indragiri Hulu dalam angka bahwasannya sektor yang di anggap unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, Ketiga sektor tersebut adalah

sektor yang paling besar menyumbangkan PDRB untuk Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini juga di dukung dengan pernyataan dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sektor unggulan di tangani langsung oleh dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yang mana kepala dinas pertanian dan perikanan menyebutkan bahwasannya Kabupaten Indragiri Hulu adalah ikon perkebunan yang ada di Provinsi Riau.

Namun dengan julukan ikon perkebunan yang di sandang oleh kabupaten Indragiri Hulu tidak sebanding dengan PDRB yang di hasilkan, terbukti Kabupaten Indragiri Hulu masih tercatat sebagai kabupaten yang memiliki jumlah PDRB ke 5 terendah di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan sub sektor perkebunan yang telah memasuki fase tidak produktif lagi yakni sebesar 30% dari total luas lahan sektor pertanian sehingga jumlah PDRB yang di hasilkan Kabupaten Indragiri Hulu juga ikut menurun dan menempatkan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten yang memiliki PDRB terendah ke 5 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

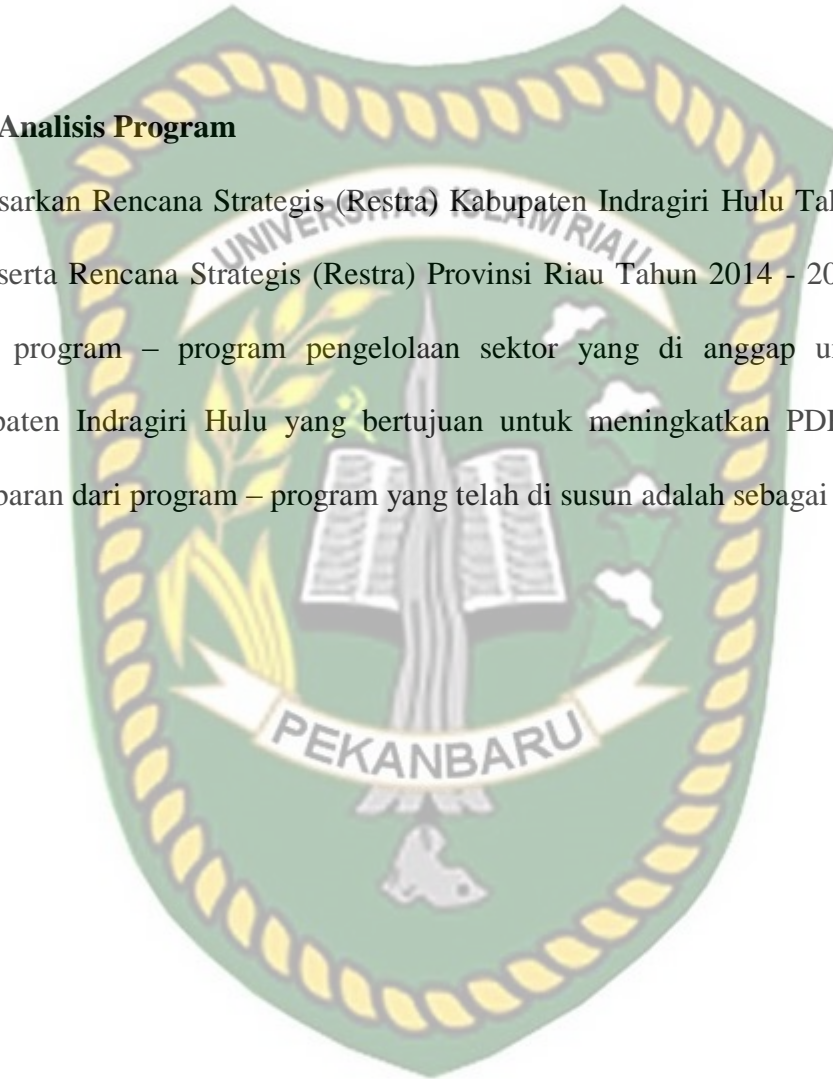
Dengan terjadinya fenomena tersebut pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dinas pertanian dan perikanan menyusun beberapa program yang di harapkan dapat mengembalikan lahan – lahan yang tidak produktif tersebut kembali produktif lagi, namun dalam realisasi program – program yang telah di susun tersebut masing belum dapat meningkatkan jumlah PDRB yang di hasilkan secara signifikan.

Hal tersebut di sebabkan kurangnya pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan kegiatan dari program yang telah di rencanakan. Kemudian tidak

semua program unggulan melakukan kegiatan evaluasi setiap kegiatan . Sehingga tidak dapat dilihat seberapa besar program itu berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

5.4.2 Analisis Program

Berdasarkan Rencana Strategis (Restra) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Strategis (Restra) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 telah di susun program – program pengelolaan sektor yang di anggap unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu yang bertujuan untuk meningkatkan PDRB daerah. Penjabaran dari program – program yang telah di susun adalah sebagai berikut:



Tabel 5.5 ANALISIS PROGRAM

Sektor Unggulan	Program Utama	Kegiatan Pendukung
Sektor Pertanian	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Tahapan-tahapan yang dilakukan menghasilkan produk seperti, buku statistic pertanian dan database kelompok tani, tersedianya sarana dan prasana pasca panen pertanian berdasarkan jenis produksinya seperti padi, jagung, kedelai, sayuran dan buah-buahan.
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Penerapan sarana dan prasaran teknologi pertanian tepat guna seperti pengaturan embung, saluran irigasi, TAM, pintu air dan saung tani. Kemudian dilakukan penyediaan alat dan mesin.
	Pada program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan menyediakan saprodi unuk kelompok tani berdasarak jenis produksinya. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan memelihara dan membangun pembibitan kelapa sawit dan karet unggul berdasarkan kelompok tani. Melakukan monitoring setiap bualan, evaluasi kegiatan-kegiatan kelompok tani. Pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura dengan menyediakan teknologi pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman perkebunan dan pertanian.
Sektor Perikanan	Pengembangan budidaya perikanan program ini mempunyai tujuan yaitu meningkatnya budidaya perikanan.	Pengembangan bibit ikan unggul dengan meningkatkan jumlah produksi bibit unggul. Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan melakukan pembinaan kelompok-kelompok mayarakat dan pengembangan produksi. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkat produksi dengan meningkatkan efisensi pekerjaan.
	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan program ini mempunyai tujuan yaitu	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perikanan dengan memberikan informasi kepada kelompok-kelompok budidaya perikanan tentang permintaan pasar. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan dengan menyediakan alat-alat peningkatan

Sektor Unggulan	Program Utama	Kegiatan Pendukung
	mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	produksi pasca panen dan pengolahan hasil panen perikanan.
Sektor Kehutanan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan program ini mempunyai tujuan yaitu memfasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HD, HKm, HTR, HR, dll).	Mengajak dan melibatkan masyarakat dalam melakukan pembibitan tanaman hutan sesuai dengan undang-undang berdasarkan tanaman-tanaman hutan produksi legal. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pemantauan penyediaan sumber benih tanaman hutan produksi yang legal.

Sumber: Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dalam peningkatan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu telah disusun beberapa program utama. Pada sektor unggulan pertanian terdapat 3 (tiga) program utama dalam peningkatannya yaitu program peningkatan pangan pertanian/perkebunan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Dalam 3 (tiga) program utama pada sektor unggulan pertanian di dukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait.

Pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan di dukung beberapa kegiatan yang dilakukan dinas terkait seperti penyusunan database potensi produksi pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan, pengembangan perbenihan/perbibitan dan penyusunan action plan pengembangan kawasan pertanian. Kegiatan pendukung yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tersebut dimaksudkan agar mampu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian di dukung oleh beberapa kegiatan utama agar tujuannya tercapai diantaranya pengadaan saran dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian, dan penyediaan saran dan prasarana pertanian. Kegiatan pendukung yang dilakukan mempresentasikan penggunaan teknologi-teknologi pembantu para petani, agar produksi pada sekto pertanian/perkebunan dapat meningkat dan lebih efisien.

Dalam program peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Indragri Hulu melakukan kegiatan pendukung yang dilakukan dinas terkait seperti

pengembangan bibit unggul, pembinaan keitraan usaha perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemantauan dan pengendalian kebakaran lahan, dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan. Kegiatan-kegiatan pendukung yang telah disusun di tujukan agar mampu meningkatkan produksi pada sektor pertanian sehingga produksinya dapat meningkat dan mampu meningkatkan dilai PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada sektor unggulan perikanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah menyusun program utama dalam mendukung produksi sektor perikanan. Program-program utama yang telah disusun dalam dokumen RENSTRA yaitu pengembangan budidaya perikanan, dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program utama tersebut mempunyai tujuan dalam meningkatkan budidaya perikanan dan pengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Program-program utama yang telah tersusun dalam RENSTRA kemudian didukung beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait agar tujuan dalam program utama tersebut dapat tercapai. Pada program utama pengembangan budidaya perikanan di dukung oleh kegiatan pengemgan bibit ikan unggul, pembinaan dan pengembangan perikanan, pengembangan dan peningkatan produksi perairan umum dan pengadaan saran dan prasarana budidaya perikanan. Kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan di orientasikan mampu membantu para pelaku usaha dalam bidang perikanan sehingga dapan meningkatkan produksi pada sektor perikanan.

Selain program budidaya, Pemerinatah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai program lanjutan yaitu optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti pengolahan informasi permintaan pasar dan produksi dan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan pendukung yang dilakukan oleh dinas terkait mempresentasikan program utama sehingga terlihat jelas tujuan yang ingin dicapai sehingga pemasaran dan nilai jual pada hasil produksi perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan produksi dan nilai jual akan berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam sektor unggulan kehutanan yang di kelola secara utuh oleh pemerintah Provinsi Riau telah disusun beberapa program utama yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat. Program –program utama yang telah disusun di dukung oleh kegiatan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hulu. Dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk pengelolaan kawasan hutan didukung kegiatan pembibitan tanaman hutan untuk kemasyarakatan dan pembinaan dan pembatauan benih. Kegiatan pendukung yang dilakukan bertujuan dalam memfasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kegiatan pendukung pada program peningkatan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat yaitu pendampingan DAK bidang kehutanan, rehabilitasi areal eks perambahan kawasan, pembibitan tanaman hutan dan pembinaan serta

pemantauan sumber benih. Kegiatan utama yang di susun diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil dari sektor kehutanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang mengelola sektor kehutanan.

5.4.3 Analisis Stake Holder

Analisi *Stakeholder* ini merupakan analisi yang cukup penting untuk memahami permasalahan yang di hadapi daerah serta program yang telah di siapkan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan analisis *Stakeholder* yaitu mengidentifikasi sejauh mana upaya serta langkah dari pihak – pihak terkait dalam pengelolaan sektor unggulan tersebut.

1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu

Pada pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu secara garis besar pemerintah daerah telah mengupayakan bantuan melalui program – program yang telah di susun untuk memaksimalkan pengelolaan sektor yang di anggap unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat meningkatkan jumlah PDRB yang di dihasilkan oleh sektor yang di anggap unggulan, namun di dalam program – program yang telah di susun tersebut ada yang harus di benahi atau di tambahkan yaitu penambahan kegiatan pemantauan langsung secara berkala terhadap program – program yang ada serta perlunya di adakan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program yang ada.

2. Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Begitu juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan sektor kehutanan yang juga menjadi sektor

yang di anggap unggulan bagi Kabupaten Indragiri Hulu, secara garis besar Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga telah mengakomodir serta berupaya mengelola sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan baik melalui program – program yang telah di susun melalui dokumen resntra. Namun dari program – program tersebut masih ada sedikit permasalahan yakni tidak adanya pengawasan dan evaluasi terhadap program yang ada secara berkala sehingga tidak di ketahui tingkat keberhasilan dari program yang telah di susun.

5.4.4 Analisis LFA (*Logical Framework Analisis*)

Logical Framework Analysis (LFA) merupakan suatu analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Lutfi ,2015). Pendekatan LFA di mulai dengan menganalisis permasalahan terhadap suatu fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu rendahnya nilai PDRB yang di hasilkan oleh daerah.

Tujuan untuk mengetahui strategi meningkatkan pengelolaan sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu. Analisis strategi peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mengadakan pengawasan (*controlling*) serta evaluasi secara berkala terhadap setiap program – program yang berkenaan dengan upaya peningkatan pengelolaan sektor yang di anggap unggulan.
2. Mengoptimalkan bantuan bibit serta sarana produksi kepada daerah yang mengalami penurunan produksi yang di karenakan tanaman pada sub sektor perkebunan sudah memasuki fase tidak produktif atau afkir sehingga dapat kembali produktif dan menambah penghasilan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Mengoptimalkan pengelolaan terhadap setiap sektor yang di anggap unggulan agar setiap sektor yang di anggap unggulan dapat sama – sama menghasilkan jumlah yang cukup signifikan terhadap PDRB kabupaten, dan jika terjadi masalah pada salah satu sektor yang di anggap unggulan angka PDRB daerah tidak menurun secara drastic seperti yang terjadi pada saat ini.

Tabel 5.6 Strategi Peningkatan Pengelolaan Sektor Unggulan di Kabupaten Indragiri Hulu

Masalah	Program	Tujuan	Strategi
Adanya lahan sub sektor perkebunan yang mengalami masa tidak produktif	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan bibit kepada petani yang perkebunanya telah memasuki masa tidak produktif 2. Melakukan pemilihan bibit unggul, 3. Melakukan pelatihan dan bantuan alat, 4. Melakukan pelatihan pengendalian hama, 5. Melakukan pelatihan dalam menggunakan pengadaan alat-alat pertanian/perkebunan untuk kualitas hasil 6. Melakukan penyuluhan tentang standart komoditas unggulan pertanian
Kurangnya controlling atau pengawasan terhadap kegiatan dari program – program yang telah di susun	Peningkatan produksi hasil sektor unggulan	Untuk mengawasi program yang telah di susun agar tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kepada setiap petani yang benar-benar membutuhkan. 2. Melakukan pengawasan pada setiap program bantuan bibit maupun sarana prasarana dari mulai penyerahan hingga penggunaan 3. Melakukan pengecekan rutin kepada petani yang mendapatkan program bantuan secara berkala.
Tidak adanya kegiatan evaluasi setiap program yang telah dibua	Melihat seberapa berhasilnya program-program yang telah di susun untuk meningkatkan hasil produksi sektor unggulan	Untuk mengevaluasi setiap program yang telah di susun	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang berkenaan dengan peningkatan hasil produksi sector unggulan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Indragiri Hulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sektor unggulan kehutanan mempunyai lahan yang paling besar yaitu 460.675 Ha, disusul dengan sektor pertanian 90.181 Ha dan sektor perikanan 6.802 Ha.
2. Pada lahan sub sektor perkebunan terdapat 30% lahan yang tidak produktif, sehingga hasil produksi di sektor perkebunan tidak maksimal.
3. Dalam program peningkatan produksi pada sektor unggulan tidak semua program didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait.
4. Tidak adanya program evaluasi terhadap program dan kegiatan pendukung yang telah disusun dan dilakukan. Sehingga tidak terlihat seberapa besar pengaruh program dan kegiatan pendukung terhadap produksi sektor-sektor unggulan.

6.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu umumnya dan stakeholder-stakeholder terkait yang mempunyai kebijakan dalam peningkatan sektor-sektor unggulan. Untuk mengatasi lahan pertanian yang sudah tidak produktif perlu dilakukan perencanaan yang baik, sehingga dalam pengelolaan di tahap selanjutnya tidak terjadi kembali proses flanting pada lahan-lahan produksi perkebunan. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan produksi sektor unggulan perkebunan, jika seluruh lahan di rencanakan dengan baik tahap demi tahap mulai dari pembibitan, perawatan, hasil produksi dan pemasaran. Sehingga nilai produksi bisa ditingkatkan dan mampu meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hulu.

Program-program yang telah disusun dan didukung dengan kegiatan oleh dinas-dinas terkait harus di imbangi dengan kegiatan evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan evaluasi program dan kegiatan dimaksudkan mampu menilai keberhasilan setiap program yang telah disusun dan dilakukan, sehingga akan nampak progres setiap program dan kegiatan sektor-sektor unggulan mampu mencapai tujuan dalam peningkatan sektor sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ketetapan dan Buku

Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang Pembangunan Nasional.

Nugroho Riant, Writhatnolo Randy R, 2011, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Kompas Gramedia

Ari kunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Refisi VI. Jakarta: Reneka Cipta

Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10

B. Kelompok Jurnal, Tugas Akhir dan Tesis

Afdal, 2010. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Riil Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. Universitas Andalas Padang.

Agung P Maulana & Mulkhan Unang, 2012. *Pelatihan Metode Logical Framework Approach (LFA) Dalam Pembuatan Business Plan Bagi Siswa Sekolah Kejuruan di SMK Negeri 6 Bandar Lampung*. Universitas Lampung

Fadilah Uray Muhammad Taufan 2016, *Analisis Sektor Unggulan Di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Diponegoro Semarang

Hardisetiawati Herlina 2012, *Strategi Kebijakan Pengembangan Minyak Sawit Merah Dengan Pendekatan Logical Framework Approach*, Institut Pertanian Bogor.

Hasibuan Muhammad Idris, 2011. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Asahan*. Universitas Negeri Medan.

Kusumaningsih Widya, 2012. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009*. Universitas Sebelas Maret

Mailendra 2016, *Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau

Nasri 2019, *Kajian Peningkatan Pendapatan petani padi di Kecamatan Bunga Raya*. Universitas Islam Riau.

Novrilasari, Dylla, 2008, *Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*, Institut Pertanian Bogor

Permada 2014, *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 1988 – 2012*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sanjaya Muhammad Krisna 2014, *Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Madiun Tahun 2007-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Siregar Rosnida 2016, *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara*. Universitas Negeri Medan.

Syafrani, Dkk 2017, *Faktor – factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan dan dampaknya terhadap kesempatan kerja*. Universitas Mulawarman, Samarinda.

Tolinggi Wawan, dkk 2012, *Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo menggunakan Dengan Pendekatan Logical Framework Approach: Laporan Penelitian*, Universitas Negeri Gorontalo.

Widiastuti Nurul 2010, *Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Klaten Tahun 2004 – 2007*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Badan Pusat Statistik, 2016, *Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2017*.

Badan Pusat Statistik, 2017, *Provinsi Riau Jumlah PDRB 12 Kabupaten Kota di*

Roychansyah M. Sani *Metode Penyusunan Program (Project Design Matrix)*

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014-2019